

**EVALUASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDART  
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK  
(SAK ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Oleh

**DEASY CAHAYADIE DEVIANA**

**NIM 0502172354**

PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**EVALUASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDART  
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK  
(SAK ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh:

**DEASY CAHAYADIE DEVIANA  
NIM 0502172354**

**PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deasy Cahayadie Deviana  
Nim : 0502172354  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 08 Desember 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. H. Adam Malik Gg Peringatan  
Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EVALUASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Deasy Cahayadie Deviana

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**EVALUASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDART  
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK  
(SAK ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :

Deasy Cahayadie Deviana

Nim. 0502172354

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

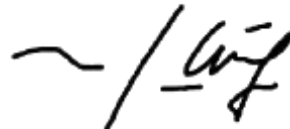
Medan, 24 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi I



**Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA**  
NIDN. 2001122002

Pembimbing Skripsi II



**Arnida Wahyuni Lubis. SE, M.Si**  
NIDN.1100000089

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



**Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A**  
NIDN. 2001077903

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EVALUASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) INSKO DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA)” an. Deasy Cahayadie Deviana, NIM 0502172354 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 02 November 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU  
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Hi. Yenni Samri Juliati Nst, M.A  
NIDN. 2001077903



Hendra Harman, SE, M.Pd  
NIDN. 2010057302

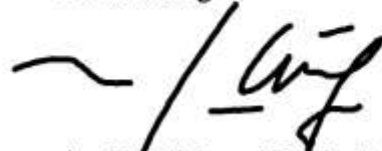
Anggota

Pembimbing I



Dr. Nurhila, SE, MA, CMA  
NIDN. 2004122002

Pembimbing II



Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si  
NIDN.1100000089

Penguji I



Dr. Kamilah, SE, Ak, MSi, CA  
NIDN. 2023107901

Penguji II



Atika, MA  
NIDN. 0106038701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

Deasy Cahayadie Deviana, NIM 0502172354, dengan judul “**Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara**” dibawah bimbingan Ibu Dr. Nurlaila, SE.,MA.,CMA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II.

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria standart yang telah ditetapkan untuk melihat kesesuaiannya. SAK ETAP merupakan solusi dari masalah yang kerap menerpa koperasi, yaitu masalah pencatatan laporan keuangan. Sebagai standart yang ditujukan untuk memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak eksternal perusahaan dan bertujuan untuk membantu entitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian SAK ETAP dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang terkait dalam penerapan SAK ETAP dalam pencatatan laporan keuangan pada KPRI INSKO. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif komparatif yaitu dengan cara: 1) mengumpulkan data Laporan Keuangan KPRI INSKO tahun 2020, 2) Memaparkan, Mengamati, Membandingkan, dan Menganalisis laporan keuangan KPRI INSKO dengan SAK ETAP, 3) Menarik kesimpulan tentang kesesuaian laporan keuangan KPRI INSKO dengan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan KPRI INSKO belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Dari 14 (empat belas) kategori, terdapat 5 (lima) kategori yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP, yaitu pada pos neraca tidak adanya akun aset dan kewajiban pajak dan klasifikasi aset yang tidak diurutkan berdasarkan likuiditas, pada pos laporan laba rugi tidak adanya akun beban pajak, pada pos catatan atas laporan keuangan tidak ada gambaran umum perusahaan dan tidak disajikannya ringkasan kebijakan akuntansi dan kendala yang terkait dalam penerapan SAK ETAP yaitu : Masih kurangnya sosialisasi kepada koperasi terhadap pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, belum adanya pelatihan kepada KPRI INSKO mengenai pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, tidak adanya aturan khusus dari pusat untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, tidak terdapat bagian khusus di bidang Akuntansi untuk menangani laporan keuangan. Semua dilakukan oleh bendahara yang merangkap beberapa fungsi tugas.

**Kata Kunci : Koperasi, SAK ETAP, Laporan keuangan.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikun Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Baginda kita Muhammad Shallallahu a'laihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang telah membawa dan menyiarkan Dinul Islam di muka bumi ini sebagai Rahmatan Lil'alamin, semoga kelak kita sebagai ummatnya mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak, Aamiin Aamiin ya rabbal A'alamin.

Skripsi ini berjudul "Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara" penulis hadirkan sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Sumatera Utara

Selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bimbingan, dorongan, motivasi serta bantuan dan masukan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini perkenankanlah penulis menghantarkan ucapan banyak terimakasih kepada yang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibunda Ramayana dan Ayahanda Erwin Devia yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kehidupan anak-anaknya yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta semangat terbesar hingga saat ini.

Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang

Akademik dan Kelembagaan.

4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.HI MA. Selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Nurlaila, SE.,MA.,CMA selaku pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran yang baik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai.
9. Ibu Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si selaku pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran yang baik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan curahan pengetahuan serta ikhlas serta nasihat-nasihat selama dibangku perkuliahan.
11. Teristimewa buat adik-adik tercinta, Dia Adinda Deviana dan Alm. M. Richy Althaf yang secara tidak langsung menjadi salah satu *support system* untuk terus semangat hingga akhir perkuliahan. *love always*
12. Terkhusus buat Laksamana Aru Sulaiman yang menjadi *support system* dan bersama-sama berproses hingga akhir semester yang selalu memberikan masukan, arahan, semangat, selalu mendengarkan keluh kesah sekaligus penghibur dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir. *hopefully always and forever*
13. Terkhusus juga buat yang tersayang Adinda Aulia Fertianti yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, yang mau direpotkan dalam proses tahap akhir semester. Terima kasih banyak.
14. Kepada yang tersayang sahabat-sahabat seperjuangan dibangku perkuliahan Fahmi Firdaus Siagian, Ade Yan Celyna, Zulaiha Harahap, Jevri Ansari, M. Gusti Pratama dan M. Alif Amansyah yang selama ini telah bersama diperkuliahan dari awal hingga akhir untuk



mendapatkan gelar sarjana dan terimakasih telah memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2017 khususnya AKS-A yang selama ini berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan yang memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
16. Kepada sahabat SMA tercinta Della Puspita, S.Akun dan Miftahul Jannah Harahap yang selalu ada dari SMA hingga sekarang, yang memberikan dukungan, motivasi dan semangat selama ini dari awal perkuliahan hingga akhir.
17. Bapak Ishak Bancin selaku Manajer KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Yang telah memberikan informasi data untuk penulisan skripsi ini
18. Pengurus PWP Tingkat Wilayah PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan tempat penulis bekerja dan mendukung sepenuhnya agar penulis bisa bekerja sembari menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih banyak.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan serta arahan yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga menjadi amal jariyah buat semuanya Aamiin, Aamiin ya Rabbal ‘Alaamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca dimasa yang akan datang akhir kata penulis mengucapkan terma kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Oktober 2021



**Deasy Cahayadie Deviana**  
**0502172354**

## DAFTAR ISI

### SURAT PERNYATAAN

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Koperasi .....	8
a. Pengertian Koperasi .....	8
b. Landasan Koperasi .....	9
c. Fungsi dan Manfaat Koperasi .....	10
d. Asas dan Tujuan Koperasi .....	11
e. Prinsip Koperasi .....	12
f. Karakteristik Koperasi .....	12
g. Koperasi Menurut Pandangan Islam .....	13
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).....	16
a. Pengertian SAK ETAP .....	16
b. Ruang Lingkup SAK ETAP .....	18

c. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP .....	18
d. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP .....	21
3. Laporan Keuangan .....	31
a. Pengertian Laporan Keuangan .....	31
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	31
c. Karakteristik Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan.....	32
B. Kajian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Teoritis .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber data Penelitian .....	52
E. Teknik dan Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik dan Analisis Data .....	54
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	56
2. Letak Geografis Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	57
3. Sejarah Singkat Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	57
4. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	58
5. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	59
B. Temuan Penelitian .....	62
1. Gambaran Singkat Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM	

Provinsi Sumatera Utara.....	62
2. Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)	
INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	62
a. Neraca .....	63
b. Laporan Laba Rugi .....	65
c. Laporan Perubahan Ekuitas .....	66
d. Laporan Arus Kas .....	67
e. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	68
C. Pembahasan Penelitian .....	71
1. Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	71
a) Perbandingan Pencatatan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dengan Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	72
b) Analisa Perbandingan Pencatatan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dengan Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	78
2. Kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 2.1 – Penelitian Terdahulu.....	37
2. Tabel 3.1 – Waktu Penelitian .....	51
3. Tabel 4.1 – Neraca Gabungan .....	63
4. Tabel 4.2 – Laporan Laba Rugi.....	65
5. Tabel 4.3 – Laporan Perubahan Ekuitas.....	66
6. Tabel 4.4 – Laporan Arus Kas.....	67
7. Tabel 4.5 – Catatan Atas Laporan Keuangan.....	68
8. Tabel 4.6 – Perbandingan Pencatatan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP dengan Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara .....	73
9. Tabel 4.7 – Rekapitulasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Gambar 2.1 – Kerangka Teoritis .....	49
2. Gambar 4.1 – Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah ditemui di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>2</sup>

Keberadaan koperasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal, barang-barang, maupun saran investasi dimana keuntungan koperasi itu sendiri akan dikembalikan kepada anggota melalui sistem sisa hasil usaha (SHU). Mudahnaya

---

<sup>1</sup>Mulyani, *Analisis Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung*, (Artikel, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013), h. 11

<sup>2</sup> ibid

mendapatkan modal dan barang-barang akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui [depkop.co.id](http://depkop.co.id), jumlah koperasi di seluruh Indonesia per 2015 adalah 212.135 unit. Dengan jumlah anggota 37.783.160 orang. Jumlah ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia usai produktif yaitu sebanyak 255.461.686 orang.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara professional akan semakin besar. Pengelolaan yang professional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standart akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>3</sup>

Setiap usaha diharapkan agar memiliki laporan keuangan, baik perusahaan besar maupun usaha kecil. Laporan keuangan perusahaan besar maupun kecil memiliki SAK (Standart Akuntansi Keuangan) yang berbeda.<sup>4</sup> Peran laporan keuangan sangat penting dalam mengukur perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi tentang keuangan dan hasil operasi koperasi tersebut. Secara periodik koperasi selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus koperasi dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya laporan keuangan koperasi pada akhir periode kepengurusan dilakukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi.<sup>5</sup>

Pada umumnya penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya

---

<sup>3</sup>J S Raflesia, Nurdita, *Analisis Penerapan Standart Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai*, (Riau : Skripsi Program sarjana Universitas Riau), 2013, h. 6

<sup>4</sup>Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.11

<sup>5</sup>Rindi, Triana, *Analisis Pemanfaatan Dana dan Akuntabilitas Koperasi Mahasiswa Citra Dana Undiksha Singaraja*, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha), 2012, h. 3



manusia dalam menyajikan laporan keuangan, koperasi seharusnya layak menggunakan SAK ETAP karena koperasi merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik meskipun modal koperasi berasal dari anggota maka laporan harus diungkapkan secara umum. Laporan hanya diungkapkan untuk anggota koperasi saja, disamping itu koperasi tidak mempunyai akuntabilitas yang tidak signifikan dan menerbitkan laporan keuangan tidak untuk tujuan umum (*general pupose financial statement*).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan untuk memakai Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk mempermudah koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 1 paragraf 1, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang : a) Tidak memiliki akuntabilitas public signifikan, dan b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat hasil. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No12/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor rill, bahwa koperasi sector rill tidak memiliki akuntabilitas publik maka diwajibkan laporan keuangannya mengacu kepada SAK ETAP.<sup>6</sup>

Dengan ditetapkannya standart tersebut, koperasi diharapkan mampu menerapkan dan menyesuaikan apa yang telah diatur di dalamnya sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong koperasi yang lebih baik. Laporan keuangan yang sesuai dengan standart pasti akan lebih dipercayai oleh pengguna laporan keuangan. Jika koperasi membuat laporan keuangan yang sesuai standart, maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas mereka dalam masyarakat.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan koperasi simpan pinjam yang telah lama berdiri serta koperasi yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Koperasi

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/PER/M.KUMKM/IX/2015 Tentang *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil*

merupakan satu-satunya wadah untuk mewujudkan kesejahteraan para pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan mensejahterakan para anggotanya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara diharapkan dengan menerapkan SAK ETAP, KPRI INSKO dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit untuk mendapatkan opini audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. Standar akuntansi keuangan ini lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Dengan telah diberlakukannya SAK ETAP di KPRI INSKO masih terdapat kekhawatiran terkait dengan pencatatan laporan keuangan karena kurangnya sosialisasi kepada koperasi maka dalam pencatatan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) penyusunan laporan keuangan yang seharusnya ditetapkan SAK ETAP, pos atau akun dalam laporan keuangan belum semuanya sesuai dan disajikan secara benar sesuai dengan SAK ETAP, pada laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan (CALK) struktur penyusunan CALK tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SAK ETAP. Dimana CALK yang disusun oleh KPRI INSKO tidak menyajikan ringkasan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan, dalam CALK hanya menyajikan penjelasan atau pos-pos laporan keuangan. Dengan demikian dalam CALK masih kurang lengkap dalam penyusunannya.

Dimana dalam Menyusun laporan keuangannya koperasi sebaiknya berpedoman kepada SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No.12 Tahun 2015 sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja koperasi secara utuh<sup>7</sup>. Selain itu juga audit keuangan yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar

---

<sup>7</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2016)

tentang posisi keuangan, hasil operasi/usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.<sup>8</sup>

Selama ini untuk pencatatan laporan keuangan telah disesuaikan menurut standar akuntansi yang berlaku karena pengguna laporan keuangan tidak hanya pihak internal saja, melainkan juga pihak eksternal misalnya lembaga pemberi kredit atau bank dan juga supaya laporan keuangan bisa dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Memang dari semua laporan keuangan memang belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan SAK ETAP disini memang ada beberapa pos/akun yang belum sesuai dengan SAK ETAP, hal ini dikarenakan keterbatasan atau kurangnya sosialisasi pada koperasi untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas dapat ditemukan bahwa pada dasarnya KPRI INSKO sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan memang biasanya entitas seperti koperasi umumnya menggunakan laporan keuangan SAK ETAP. Meski KPRI INSKO sudah menerapkan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, namun tidak mencakup semua laporan keuangan yang ada. Dari semua laporan keuangan masih ada pos-pos yang tidak sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

Terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Maharani Trivena (2018) dengan judul Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Pada UKM Rizprod Equipment. Yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa laporan keuangan pada UKM Rizprod sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang dibuat oleh Rizprod Equipment hanyalah laporan arus kas dan belum sesuai dengan SAK ETAP, dimana laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP minimal terdapat neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan rugi laba. Pencatatan keuangan yang masih sederhana ini dikarenakan kesibukan menangani order dan tidak ada pegawai khusus yang beralatar belakang pendidikan Akuntansi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, dikarenakan pelaku usaha memandang tidak perlunya pertanggung jawaban

---

<sup>8</sup>Arnida Wahyuni, *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*, (Medan: FEBI UIN Sumatera Utara, 2018), h. 20

<sup>9</sup>Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 19 Juni 2021

keuangan secara detail karena semua laporan keuangan yang dibuat hanyalah untuk konsumsi pribadi sehingga anggapannya adalah cukup dimengerti oleh pemilik usaha.

Hal ini yang memotivasi peneliti untuk lebih menilai pentingnya laporan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Koperasi dalam menjalankan tugasnya untuk sebagai pengambilan keputusan juga mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dan yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pencatatan laporan keuangan khususnya penerapan SAK ETAP di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

##### **b. Bagi Pembaca**

Memberi manfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi tentang penerapan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) kedalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

##### **c. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

Untuk memberikan masukan dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP)



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Koperasi

###### a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *corporative*, secara sederhana berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara

---

<sup>1</sup>Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 13

<sup>2</sup>Pachta Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 25

terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.<sup>3</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.<sup>4</sup> Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan. Dengan kata lain koperasi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Karena itu, koperasi dapat menyelenggarakan usaha simpan pinjam (koperasi kredit) dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian koperasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara bersama-sama yang berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.

## **b. Landasan Koperasi.**

### 1) Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan falsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi Idil koperasinya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1976.

### 2) Landasan Struktural Dan Landasan Gerak

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan". Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah

---

<sup>3</sup>Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu, 2003) h. 3

<sup>4</sup>Rudianto, *Akuntansi Koperasi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), h.4



perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

### 3) Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*). rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.<sup>5</sup>

### 4) Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. berikut ini landasan operasional koperasi Indonesia:

- a) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- b) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi

### c. Fungsi dan Manfaat Koperasi

Dalam Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial
- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

---

<sup>5</sup>Karta Sapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.7

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>6</sup>

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan koperasi di bidang sosial.

a. Manfaat koperasi di bidang ekonomi:

- 1) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya
- 2) Menumbuhkan motif berusaha yang berprikemanusiaan
- 3) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi
- 4) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat

b. Manfaat koperasi di bidang sosial:

- 1) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram
- 2) Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang di bangun tidak diatas hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan
- 3) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerj sama dan semangat kekeluargaan.

**d. Asas dan Tujuan Koperasi**

Undang-Undang Dasar Nomor 25 tahun 1992, Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembela utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

---

<sup>6</sup>Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta:Deepublish, Januari 2017), h. 36

Undang-Undang Dasar Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Berdasarkan bunyi pasal 33 UU No.25 Tahun 1992 itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

#### **e. Prinsip Koperasi**

Di dalam Undang-Undang RI No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi yaitu :

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
- 3) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing masing anggota
- 4) Modal diberi balas jasa secara terbatas
- 5) Koperasi bersifat mandiri.<sup>8</sup>

#### **f. Karakteristik Koperasi**

Koperasi berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti disajikan berikut ini :

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 33

<sup>8</sup>Ibid, h. 46

- 1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama
- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta tanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota percaya pada nilai-nilai etika kejujuran dan keterbukaan
- 3) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- 4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota
- 5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.<sup>9</sup>

#### g. Koperasi Menurut Pandangan Islam

Apabila koperasi dipahami secara bahasa, yaitu kerja sama atau usaha bersama dan bukan secara istilah maka koperasi sudah ada pada sebelum masa Nabi. Sebagaimana terlihat dalam hadist di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَ قُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِي مَالٍ يُنْ أَحَدُهَا  
صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka.*<sup>10</sup>

Hadist ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerjasama dalam satu bisnis, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya. Dengan melihat hadist tersebut diketahui

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Prenadamedia Group, 2012), h. 226

bahwa masalah serikat (dalam hal ini koperasi) sudah dikenal sejak sebelum islam datang, dengan sistem kerjasamanya yang telah diajarkan Rasulullah . Sikap kerja sama, saling bantu dan tolong menolong itu memang di ajarkan dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah berfirman :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*(QS. Al-Maidah :2).<sup>11</sup>

Dari tafsir ayat di atas dijelaskan, Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar (hal ini dinamakan ketakwaan) Allah SWT melarang mereka bantu membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal hal yang di haramkan.<sup>12</sup>

Dan di ayat lain juga di jelaskan tentang perserikatan (koperasi) :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh....”*(QS. Sad: 24).<sup>13</sup>

<sup>11</sup>QS. Al-Maidah :2

<sup>12</sup>Teungku Muhammad Hasbi asd-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), h. 634

<sup>13</sup>QS. Shaad : 24

Ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi atas adanya akad (ikhtiyar).<sup>14</sup>

Tidak terlepas dari itu semua, islam juga mengajarkan tentang pertanggungjawaban yang terdapat dalam Surah Al-Qiyamah Ayat 36, berikut ini:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ ٣٦

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”.<sup>15</sup>

Makna dari ayat ini adalah tidaklah ia dibiarkan begitu saja di dunia ini tanpa dikenakan perintah dan larangan, dan tidaklah ia dibiarkan pula di dalam kuburnya dengan sia-sia tanpa dibangkitkan kembali, bahkan dia dikenai perintah dan larangan di dunia ini, lalu digiring kembali kepada Allah di hari kemudian setelah dibangkitkan. Juga terdapat dalam surah Al- Mudatsir ayat 38 yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>16</sup>

Di sini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya. Segala sesuatu yang diperbuat harus mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya itu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Sri Dewi Anggadini, Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2017), h. 160

<sup>15</sup>QS. Al-Qiyamah : 36

<sup>16</sup>QS. Al- Mudatsir : 38

<sup>17</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta : PT. Intermesa), h. 868

## 2. Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

### a. Pengertian SAK ETAP

SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sebagaimana ditentukan bahwa SAK ETAP merupakan adopsi dari IFRS for SME. SAK ETAP dipergunakan untuk perusahaan yang belum *go public*, bukan fidusia (bank, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya),<sup>18</sup>

SAK ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.<sup>19</sup>

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau; b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK ETAP berlaku efektif sejak 1 januari 2011 dan penerapan dini diperkenankan.<sup>20</sup>

SAK ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam standar ETAP adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Sirus Sitanggang, et, al, *Panduan Akuntansi Keuangan Bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP*, ( Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017) h. 3

<sup>19</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2016)

<sup>20</sup>DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta, IAI, 2016), H.ETAP 1

- 1) Tidak ada laporan laba rugi komprehensif pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca;
- 2) Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi nilai wajar;
- 3) Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.<sup>21</sup>

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP, penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

Standar ini efektif dapat digunakan untuk laporan keuangan tahun 2009, Entitas yang memenuhi kriteria menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap menggunakan PSAK maka pada tahun berikutnya harus konsisten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah menggunakan SAK ETAP.

SAK ETAP menggunakan prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif. Pervasif berarti dalam hal tidak ada pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk suatu transaksi atau peristiwa maka entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Persyaratan untuk pengakuan, dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Supami Wahyu Setiyowati, et, al., *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP* ( Jakarta, Mitra Wacana Media,2018). h 12

<sup>22</sup>Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2016) h. 155



## **b. Ruang lingkup SAK ETAP**

Menurut IAI Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas signifikan, dan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal, atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
- c) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.<sup>23</sup>

## **c. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP.**

Paragraf 3.2, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*.

Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja

---

<sup>23</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2016)

keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Paragraf 3.3, Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

Paragraf 3.4, Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

Paragraf 3.5, Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- 1) Fakta tersebut;
- 2) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek dan ;
- 3) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

Paragraf 3.6, Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan, atau ;
- 2) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Paragraf 3.7, Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- 1) Sifat reklasifikasi;
- 2) Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- 3) Alasan reklasifikasi.

Paragraf 3.8, Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- 1) Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- 2) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

Paragraf 3.9, Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Paragraf 3.10, Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Paragraf 3.11, Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

#### **d. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP**

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.<sup>24</sup>

##### 1) Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) Persediaan;
- d) Properti investasi;
- e) Asset tetap;
- f) Asset tidak berwujud;
- g) Utang usaha dan utang lainnya;

---

<sup>24</sup>Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), h. 136

- h) Asset dan kewajiban pajak;
- i) Kewajiban diestimasi;
- j) Ekuitas

Ekuitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

## 2) Laporan Laba Rugi

Paragraf 5.1, ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

Paragraf 5.2, Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat *bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan*).

Paragraf 5.3, Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan;
- 2) Beban keuangan;
- 3) Bagian laba dan rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- 4) Beban pajak;
- 5) Laba atau rugi neto.

Paragraf 5.4, Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Paragraf 5.5, Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 5.6, Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Analisis menggunakan sifat beban :

- 1) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Analisis menggunakan fungsi beban :

- 2) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Paragraf 5.7, Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.

Paragraf 5.8, Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 19-20

### 3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a) Laba atau rugi untuk periode;
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
- d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
  - 1) Laba atau rugi;
  - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  - 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

### 4) Laporan Arus Kas

Paragraf 7.1, mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas

entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan terjadi selama satu periode dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.2, Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi dan lainnya. Oleh karena itu, investasi pada umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Paragraf 7.3, Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Paragraf 7.4, Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu arus kas pada umumnya berasal dari investasi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

- a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain
- c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksud untuk dijual kembali.



Beberapa transaksi seperti penjualan, peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

Paragraf 7.5, Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya ;
- b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya ;
- c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Paragraf 7.6, Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah

- a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain
- b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas
- c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya

- d) Pelunasan pinjaman
- e) Pembayaran kas oleh lessee atau untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Paragraf 7.7, Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Paragraf 7.8, Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dampak dari :

- a) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan
- b) Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Paragraf 7.9, Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

Paragraf 7.10, Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.

Paragraf 7.11, Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga

yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau investasi.

Paragraf 7.12, Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi.

Paragraf 7.13, Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Paragraf 7.14, Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

Paragraf 7.15, Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi nonkas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi nonkas adalah :

- a) Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan
- b) Akuisisi suatu entitas melalui sewa pembiayaan

c) Konversi utang menjadi modal.

Paragraf 7.16, Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Paragraf 7.17, Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.<sup>26</sup>

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Paragraf 8.1, mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.2, Catatan atas laporan keuangan harus :

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai paragraf 8.5 dan 8.6 dalam SAK ETAP
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.3, Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan

---

<sup>26</sup>DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta, IAI, 2016) h.ETAP 21-22

keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 8.4, Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3)
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5)
- c) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d) Pengungkapan lain.

Paragraf 8.5, Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan :

- a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- b) Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.6, Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.7, Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan

kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang :

- a) Sifat , dan ;
- b) Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.<sup>27</sup>

### 3. Laporan Keuangan

#### a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu<sup>28</sup>

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menam[ilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasdalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivasi ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial dan signifikan dalam pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

Buku Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas keuangan.

#### b. Tujuan Laporan Keuangan

Paragraf 2.1, Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau

---

<sup>27</sup>Ibid, h 27-28

<sup>28</sup>Sofyan Safri, *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2009) h.105

<sup>29</sup>Kieso, Weygandt *Intermediate Accounting*, Volume I IFRS Edition ,United State Of America,2011, h.5

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Disamping itu tujuan lainnya dalam laporan keuangan syariah adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; dan
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap Amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

Laporan keuangan yang disusun oleh tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama Sebagian pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.<sup>30</sup>

### **c. Karakteristik Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan**

#### **1) Dapat Dipahami**

Paragraf 2.2, Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh penggunanya. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk memepelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

---

<sup>30</sup>Nurlaila., dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Medan : Madenatera,2019), h.90

## 2) Relevan

Paragraf 2.3, Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

## 3) Materialitas

Paragraf 2.4, Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

## 4) Keandalan

Paragraf 2.5, Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

## 5) Subtansi Mengungguli Bentuk

Paragraf 2.6, Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.



6) Pertimbangan Sehat

Paragraf 2.7, Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7) Kelengkapan

Paragraf 2.8, Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan

Paragraf 2.9, Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

### 9) Tepat Waktu

Paragraf 2.10, Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

### 10) Keseimbangan Antara Biaya Dan Manfaat

Paragraf 2.11, Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.<sup>31</sup>

Terlepas dari itu semua islam juga telah mengajarkan kita tentang pencatatan akuntansi yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

<sup>31</sup>DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta, IAI, 2016) h. 3-5

تَسْرُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada*

*dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>32</sup>

Ayat Al-Qur'an diatas merupakan bukti sekaligus arahan terkuat bahwa islam adalah risalah yang sangat mendorong untuk tertib administrasi dan transparansi. Semua transaksi, selebih lagi yang *future delivery*, harus ditulis secara apik dan detail. Hal ini tersurat dari penekanan perintah menulis yang diulang tak kurang dari 5 kali dalam 5 baris pesan. Sebagai pengejawatahan perintah ini umuat islam sepanjang sejarahnya telah memulai tradisi pencatatan *transactional accounting* yang sangat mengagumkan. Sahabat Nabi Hasan Ibn Stabit misalnya, telah mengaplikasikan double entry system dalam administrasi Diwan Bait Al-Mal beratus tahun lalu.<sup>33</sup>

Adapun Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:

- a) Mencatat transaksi Dalam ayat diatas setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata "*ka-ta-ba*" yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.
- b) Periode atau Waktu Akuntansi Ayat diatas juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

## **B. Kajian Terdahulu**

Banyak Penelitian yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya beberapa diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>QS. Al-Baqarah : 282

<sup>33</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Pengantar Teologi Ekonomi*, (FEBI UIN-SU Press, 2014) h.257

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini	Persamaan dengan penelitian ini
1.	Shinta Maharani Trivena (2018). Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Pada UKM Rizprod Equipment Sesuai Dengan SAK ETAP. <sup>34</sup>	Deskriptif kualitatif	Laporan keuangan yang dibuat oleh Rizprod Equipment hanyalah laporan arus kas dan belum sesuai dengan SAK ETAP, dimana laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP minimal terdapat neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan rugi laba. Pencatatan keuangan yang masih sederhana ini dikarenakan kesibukan menangani order dan tidak ada pegawai khusus yang beralatar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Shinta Maharani adalah UKM Rizprod Equipment. Sedangkan yang dilakukan peneliti di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Waktu penelitian shinta tahun 2018 sedangkan peneliti ini tahun 2021.</li> <li>3. Hanya menggunakan 4 laporan keuangan yaitu : Neraca, Laporan laba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.</li> <li>2. Sama-sama menggunakan jenis analisis data kualitatif dan kuantitatif</li> <li>3. sama-sama menggunakan Teknik analisis data yang sama.</li> </ol>

<sup>34</sup>Shinta Maharani Trivena, "Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Pada Ukm Rizprod Equipment Sesuai Dengan SAK ETAP" *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, (Volume:11, Nomor:2, Desember 2017), Hal:213-220, 2018

			<p>belakang pendidikan Akuntansi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, dikarenakan pelaku usaha memandang tidak perlunya pertanggung jawaban keuangan secara detail karena semua laporan keuangan yang dibuat hanyalah untuk konsumsi pribadi sehingga anggapannya adalah cukup dimengerti oleh pemilik usaha</p>	<p>rugi, Laporan arus kas dan Laporan perubahan modal, tidak ada catatan atas laporan keuangan</p> <p>4. Hasil kesimpulan bahwa hanya pos laporan arus kas yang tidak sesuai dengan SAK ETAP sedangkan peneliti yang tidak sesuai pada pos neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan</p>	
2.	<p>Kumala Sari Hafid, Ernawati Malik, Husnah Katjina (2019) Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar telah memuat</p>	<p>1. Tempat penelitian yang digunakan Kumala Sari Pada Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar sedangkan peneliti di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM</p>	<p>1. Sama-sama menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif</p> <p>2. Sama-sama mempunyai 5 laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan</p>

	<p>Pada Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar).<sup>35</sup></p>		<p>penilaian dan penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada unsur-unsur laporan keuangan, Namun ada beberapa penilaian dan penyajian yang belum sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2009 tentang Akuntansi Perkoperasian diantaranya penyajian akun kas dan bank disajikan secara terpisah pada neraca Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar; belum dibuatnya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; serta penyusunan neraca atau</p>	<p>Provinsi Sumatera Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Waktu penelitian 2019 sedangkan peneliti 2021</li> <li>3. Teknik analisis data yang digunakan kumala sari dekriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif-komparatif</li> <li>4. Hasil penelitan yang dilakukan Kumalasari semua laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP sedangkan penulis yang tidak sesuai hanya pada pos neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>	<p>modal dan catatan atas laporan keuangan</p>
--	---------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

<sup>35</sup>Kumala Sari Hafid,dkk, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM.Buton, (Volume 1 Nomor 1 – Desember 2019), Hal: 65-82, 2019*

			laporan posisi keuangan, penghitungan sisa usaha atau laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan SAK ETAP		
3.	Zainal (2019) Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai. <sup>36</sup>	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai belum sesuai dengan penerapan pada laporan keuangan menurut SAK ETAP. Hal – hal yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut antara lain : 1. KSU Sumber Rezeki Kota Binjai hanya	1. Tempat penelitian Zainal di KSU Sumber Rezeki Kota Binjai, sedangkan peneliti di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. 2. Waktu penelitian Zainal tahun 2019, sedangkan peneliti tahun 2021. 3. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif sedangkan	1. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif 2. Sama-sama menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif 3. Sama-sama memiliki 5 laporan keuangan

<sup>36</sup>Zainal, “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai”, Teknik Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*, 3 (2) November 2019), Hal:104 – 112, 2019



		<p>menyusun laporan keuangan berupa neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari :</p> <p>Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.</p> <p>2. Dalam penyusunan akun piutang di laporan neraca KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun piutang menjadi dua yaitu putang dan piutang ragu-ragu. Sedangkan menurut SAK ETAP seharusnya penyajian akun piutang terbagi menjadi dua yaitu piutang anggota dan</p>	<p>peneliti menggunakan deskriptif kualitatif komparatif.</p> <p>4. Hasil kesimpulan pada Zainal bahwa yang tidak sesuai dengan SAK ETAP yaitu pada pos neraca, perhitungan hasil usaha (laba rugi) dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada peneliti yang tidak sesuai pada SAK ETAP yaitu pada pos neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang menjadi perbedaan pada peneliti Zainal bahwa pos-pos yang tidak sesuai berbeda dengan peneliti</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>piutang non anggota.</p> <p>3. Dalam penyusunan akun pendapatan di laporan perhitungan hasil usaha KSU Sumber Rezeki Kota Binjai menyusun akun pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan jasa pinjaman dan pendapatan unit usaha.</p> <p>Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai Sementara menurut SAK ETAP yang seharusnya penyajian akun pendapatan terbagi dua bagian yaitu pendapatan anggota dan pendapatan non anggota.</p> <p>4. Pada Catatan atas laporan keuangan KSU</p>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>Sumber Rezeki kota Binjai tidak membuat sejarah koperasi, NPWP koperasi, dan ijin-ijin usaha koperasi serta tidak membuat informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP catatan atas laporan keuangan harus dilengkapi dengan gambaran umum koperasi, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan Penjelasan yang mendukung pos – pos dan perhitungan hasil usaha</p>		
4.	<p>Rezka Basyarullah (2018) Implementasi Penyajian Laporan Keuangan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Klinik Musik masih belum ada,</p>	<p>1. Tempat penelitian Rezka di Klinik Musik Surabaya , sedangkan peneliti di</p>	<p>1. Sama-sama menggunakan jenis data kualitatif 2. Sama-sama menggunakan metode</p>

	<p>Pada Klinik Musik Surabaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.<sup>37</sup></p>		<p>dari kelima unsur Laporan keuangan, Klinik Musik hanya membuat Laporan Laba/rugi. Laporan laba rugi yang dibuat sangat sederhana, informasi yang disampaikan hanya untuk mengetahui keuntungan melalui jumlah keseluruhan pendapatan dikurangi jumlah seluruh beban. Penyusunan laporan keuangan pada Klinik Musik masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Lima unsur laporan keuangan masih belum seluruhnya diterapkan, Klinik Musik hanya</p>	<p>KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Waktu penelitian Reza Basyarullah tahun 2018, sedangkan peneliti tahun 2021.</p> <p>3. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif komparatif.</p> <p>4. Hasil kesimpulan pada rezka bahwa yang tidak sesuai adalah laporan laba rugi yang masih dibuat dengan sederhana sedangkan pada peneliti yang tidak sesuai dengan SAK ETAP</p>	<p>deskriptif kualitatif</p> <p>3. Sama-sama mempunyai 5 laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>37</sup>Rezka Basyarullah, "Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Pada Klinik Musik Surabaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surabaya, 2018

			<p>membuat laporan laba rugi dengan sederhana, dan untuk mengontrol usahanya, pemilik cukup mencatat transaksi yang terjadi setiap hari. Klinik Musik belum memperhatikan kewajaran laporan keuangan, yaitu belum memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Pihak Klinik Musik dalam membuat penilaian kelangsungan usaha hanya berdasarkan laporan laba rugi. Laporan tersebut belum konsisten dibuat setiap akhir bulan, akan tetapi masih dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam hal</p>	<p>yaitu pada pos Neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>materialitas, pihak Klinik Musik belum memperhatikan materialitas transaksi. Laporan keuangan yang disajikan belum lengkap dan belum diidentifikasi Klinik Musik memiliki beberapa kendala dalam membuat laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut : Klinik Musik belum memiliki SDM yang mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Kegiatan Klinik Musik kebanyakan dilapangan sehingga sulit untuk mencatat, yang penting bukti transaksi seperti nota atau kwitansi disimpan. Belum ada</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

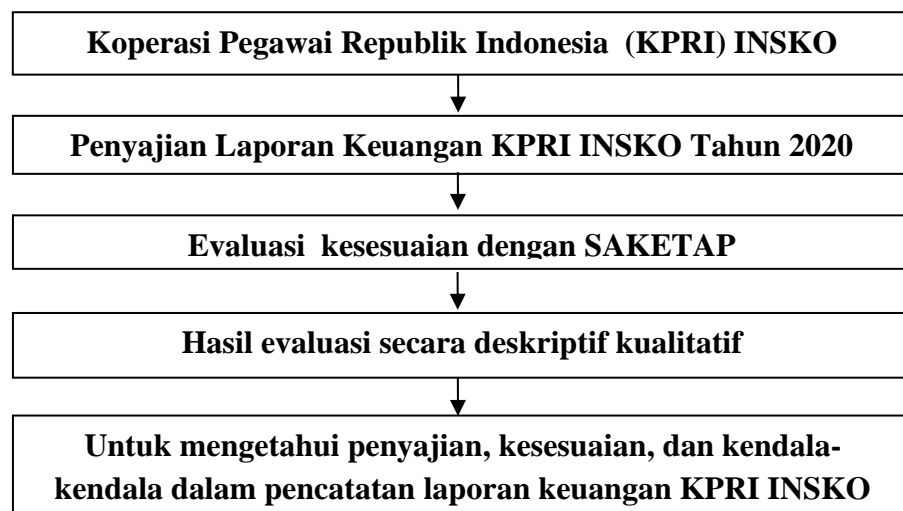
			pemisahan rekening antara pribadi dengan usahanya.		
5.	Linda Apriani (2018) Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS). <sup>38</sup>	Studi Kasus	Diambil kesimpulan secara garis besar bahwa PT BPRS Puduarta Insani sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hal ini dapat dibuktikan : 1. Entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kdan catatan	1. Tempat penelitian Linda Apriani di Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS) sedangkan peneliti di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. 2. Waktu penelitian Linda Apriani tahun 2018, sedangkan peneliti tahun 2021. 3. Hasil kesimpulan pada Linda bahwa laporan yang disajikan sudah sesuai dengan SAK ETAP sedangkan pada peneliti belum sesuai dengan SAK ETAP yaitu	1. Sama-sama menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif 2. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif 3. Sama-sama menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif komparatif 4. Sama-sama mempunyai 5 laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan

<sup>38</sup>Linda Apriani, "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS)", Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

			atas laporan keuangan. 2. Tidak terdapat kendala dalam penerapan SAK ETAP di PT BPRS Puduarta Insani dalam proses penyajian laporan keuangannya.	pada pos Neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

### c. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian.<sup>39</sup> Untuk memberikan gambaran tentang pemikiran peneliti, maka akan dijelaskan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis**

<sup>39</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta, Grasindo, 2016), h. 27



Penjelasan atas gambar tersebut adalah:

1. Pertama, peneliti menggunakan data di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO
2. Kemudian, data yang digunakan berupa laporan keuangan KPRI INSKO Tahun 2020
3. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan SAK ETAP
4. Lalu, hasil evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif
5. Terakhir, setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut maka peneliti akan mengetahui penyajian, kesesuaian, dan kendala-kendala dalam pencatatan laporan keuangan KPRI INSKO dengan SAK ETAP

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>1</sup>

Sedangkan, Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari perannya.<sup>2</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto No. 218 Km 5,5 Medan 20123.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Juni - Oktober 2021

Tabel 3.1

No.	Kegiatan	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1.	Penyusunan Proposal Skripsi						
2.	Seminar Proposal						
3.	Revisi Proposal						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Menganalisis Data						
6.	Revisi Skripsi						
7.	Sidang Munaqasyah						

<sup>1</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.4

<sup>2</sup>Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik ( E-Book ) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan* (Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-9), h.5

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah subjek yang ditunjukkan untuk diteliti oleh peneliti.<sup>3</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Manager Pelaksana di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
2. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>4</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian.<sup>5</sup> Uraian yang dimaksud dalam bentuk wawancara dan jenis data kuantitatif yaitu bentuk laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>6</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>3</sup>Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h.108

<sup>4</sup>Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.45

<sup>5</sup>*Ibid.*,h.47

<sup>6</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT.Grafindo Media Pratama, 2007), h. 79

#### b) Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya koran, dokumen, dan bacaan lainnya.<sup>7</sup> Dalam hal ini berupa dokumentasi Laporan Keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuisisioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkapkan penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup>

#### 2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*Indepth Interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key information*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.<sup>9</sup> Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan.

#### 3. Dokumentasi

---

<sup>7</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi: -Jilid 3*, (Jakarta: ESIS, 2006), h.110

<sup>8</sup>M. Askari Zakariah, et. al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development (R and D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h.43

<sup>9</sup>Sony Lamonisi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon", *Jurnal EMBA* (Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 223-230), h. 226

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup> Pelaksanaannya peneliti akan menggunakan data laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara beserta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif-komparatif yaitu metode analisis yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dengan membandingkan teori-teori dengan praktik yang terjadi didalam perusahaan, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup>

Adapun tahapan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berupa sesi dokumentasi serta wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Manajer Pelaksana Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera untuk mendapatkan data di lapangan yang akan digunakan untuk penelitian.

### **2. Reduksi Data**

---

<sup>10</sup>Jumania Septariani, “*Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR) Vol. 2 No. 1, Desember 2018, 32-51, h.40

<sup>11</sup>M. Hariwijaya, *Metodologi Dan Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, (Jakarta, Diandra Kreatif, 2017) h. 53

Setelah data diperoleh lalu dipindahkan dengan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci yaitu dengan memaparkan, mengamati laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan SAK ETAP.

### 3. Penyajian Data

Setelah data dipindahkan maka selanjutnya adalah membandingkan dan menganalisis data laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan SAK ETAP berupa tabel ataupun wawancara.

### 4. Mengambil Kesimpulan

Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan menarik kesimpulan tentang kesesuaian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan SAK ETAP.

---

<sup>12</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.81

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera berdiri pada tahun 1964 pada Instansi Inspektorat Koperasi yang sekarang bernama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Terbentuknya koperasi ini diprakarsai oleh Raja Tindil Manik yang merupakan Kepala Inspektorat Koperasi pada masa itu.

Latar belakang berdirinya koperasi ini adalah keinginan dari para pegawai negeri di lingkungan Inspektorat Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus sebagai pegawai di lingkungan Inspektorat Koperasi. Selain itu sebagai instansi yang membina koperasi di Sumatera Utara, Inspektorat Koperasi memiliki tanggung jawab untuk membangun ekonomi rakyat yang berbentuk Koperasi. Disamping itu juga adanya pemikiran bahwa sudah sewajarnya kantor pemerintah yang membina koperasi di Sumatera Utara memiliki koperasi sendiri bagi para pegawainya.

Pada tahun 2007 badan hukum KPRI INSKO diubah, dari nomor 10/PAD/KWK.2/IV/95 yang disahkan pada tanggal 20 April 1995, diubah menjadi nomor: 518/33/BH/PAD/II.14/VIII/KUKM/2007, dengan Klasifikasi A. KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai badan usaha memiliki beberapa unit usaha perdagangan dan jasa. Bidang usaha tersebut melayani anggota maupun non anggota, antara lain sebagai berikut:

- a. Unit usaha simpan pinjam
- b. Unit usaha pertokoan

## **2. Letak Geografis Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah koperasi yang terletak di Jl Jend. Gatot Subroto No. 218 Km 5,5 Medan 20123. Secara geografis, KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Meugah Aluminium
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Sekolah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Shipper Medan Helvetia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dairi Motor

## **3. Sejarah Singkat Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

Awal terbentuknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ini diprakarsai oleh Raja Tindil Manik yang merupakan Kepala Inspektorat Koperasi pada masa itu. Anggotanya adalah pegawai-pegawai dari inspektorat koperasi tersebut. Dari tahun ke tahun KPRI INSKO terus mengalami perubahan. Seperti pernah menerima bantuan dari pemerintah yang diatur oleh dinas terkait yang ada di kabupaten/kota. Pernah berpindah lokasi dari daerah Helvetia menuju daerah Gatot Subroto, Medan.

Pengurus inti KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara saat ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ada juga badan pengawas yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan pelaksanaannya dikomandoi oleh seorang manajer yang membawahi dua unit usaha pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yaitu unit simpan pinjam dan unit toko. Jumlah anggota KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah 101 orang (yang merupakan pegawai-pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara).



#### **4. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Terwujudnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Pelayanan prima bagi anggota”.

Misi dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

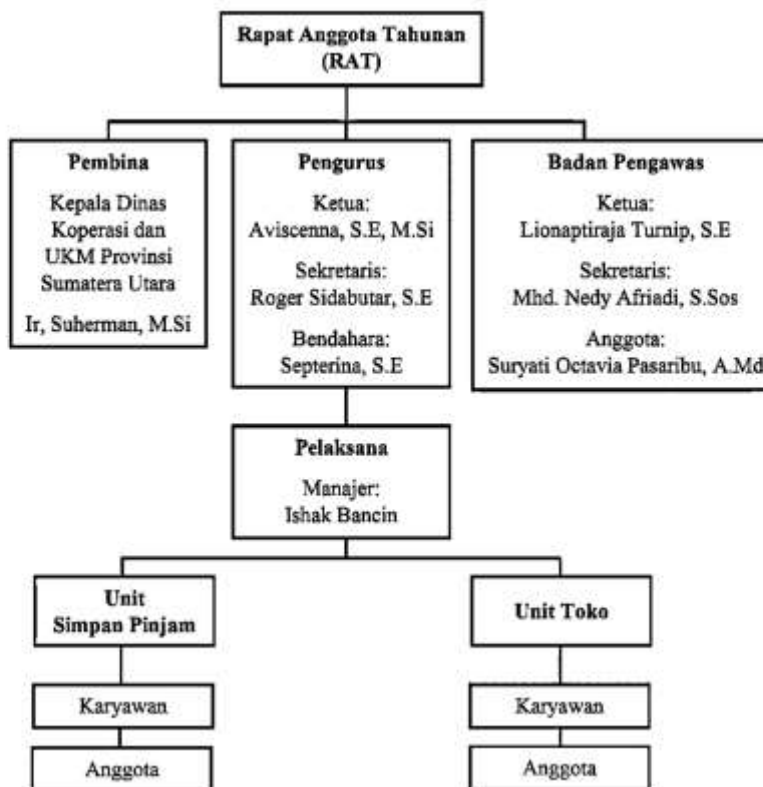
- a. Mengembangkan unit-unit usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya.
- b. Meningkatkan kualitas dan kemampuan manajemen serta profesionalisme kewirakoperasian pengurus, pengawas, manager dan karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mengoptimalkan dan memberdayakan Aset dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga ekonomi yang modern dan berwatak kerakyatan.

Tujuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

- a. Menyejahterakan anggota yang tergabung didalamnya
- b. Meningkatkan hasil usaha KPRI INSKO
- c. Mengembangkan pekerjaan dan jaringan usaha kemitraan yang lebih luas
- d. Meningkatkan kinerja, pengurus, pengawas, manager dan karyawan KPRI INSKO yang professional dan akuntabel
- e. Meningkatkan partisipasi, disiplin dan tanggung jawab anggota dalam berbagai program dan kegiatan KPRI INSKO
- f. Meningkatkan Kerjasama koordinasi dengan berbagai instansi terkait

## 5. Struktur organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

- a. Struktur atau bagan dari kepengurusan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.1**

### Struktur organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

- b. *Job Description*

Berikut akan disajikan uraian tugas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi didalam koperasi, dimana setiap anggota mempunyai hak untuk

menghadirinya. Rapat anggota yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Pengambilan suara dilakukan secara tertulis apabila hal ini dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang berhak suara di dalam rapat. Jikalau tidak, maka diambil dengan cara mengangkat tujuan dan anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya kepada orang lain.

## 2. Pembina

Pembina adalah orang yang senantiasa memantau aktivitas koperasi. Pembina tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa atau anjuran pada pengurus koperasi, baik diminta maupun tidak

## 3. Ketua

Ketua bertugas memimpin Rapat-rapat Anggota dan Rapat Pengurus, menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan, menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua, atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi

## 4. Sekretaris

Bertugas untuk membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari Rapat-rapat Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada para anggota sebelum rapat diadakan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Sekretaris menjalankan tugastugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan pengurus dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

## 5. Bendahara

Tugasnya adalah mengurus pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan, mengusahakan tambahan modal untuk koperasi, mengurus administrasi keuangan, membuat dan

mengkoordinasikan potongan gaji, bertindak sebagai kasir, memberikan kredit pinjaman.

#### 6. Badan Pemeriksa

Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya sendiri. Pemeriksaan itu dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang terdiri atas tiga orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurusan dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

#### 7. Manajer

Koperasi dalam memperlancar kegiatan operasional dalam suatu organisasi perlu satu orang manajer untuk mewujudkan suatu tujuan yang ditetapkan organisasi. Pada dasarnya peranan manajer adalah mengarahkan koperasi kearah pencapaian tujuan dan sasaran. Pada umumnya organisasi didirikan berdasarkan tujuan, dan para manajer bertugas untuk menggunakan serta menggabungkan semua sumber-sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan. Manajemen menjalankan koperasi kearah pencapaian tujuan dengan menegaskan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh para anggota koperasi.

#### 8. Karyawan

Koperasi Karyawan atau pegawai adalah orang yang diangkat atau dipilih oleh Pengurus Koperasi untuk sebagai tenaga kerja pada koperasi.

#### 9. Anggota

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana dalam Anggaran Dasar.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Gambaran Singkat Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.**

Dalam melakukan analisis data, penulis mengambil data Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 218 Km 5,5 Medan 20123. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang evaluasi pencatatan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan SAK ETAP. Dasar penelitian ini menggunakan data utama yaitu laporan keuangan KPRI INSKO tahun 2020. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penulis memaparkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kemudian data tersebut akan dibandingkan menggunakan tabel dengan aturan yang terdapat dalam SAK ETAP sehingga dapat diketahui kesesuaian dengan SAK ETAP terhadap pencatatan laporan keuangan KPRI INSKO. Terakhir menjelaskan serta mendeskripsikan hasil dari evaluasi pencatatan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

### **2. Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

#### **a. Neraca**

**Tabel 4.1**  
**Neraca Gabungan**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>					
<b>NERACA GABUNGAN</b>					
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2020</b>					
	<b>31 Desember 2020 Rp</b>	<b>31 Desember 2019 Rp</b>		<b>31 Desember 2020 Rp</b>	<b>31 Desember 2019 Rp</b>
<b>AKTIVA</b>			<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Kewajiban Lancar</b>		
Kas	14.625.023,07	32.008.735,04	Hutang Usaha	65.690.622,28	64.674.622,28
Bank	1.188.864.590,42	833.186.982,42	Tabungan Sikosi	1.045.659,09	1.045.659,09
Piutang Usaha	1.636.523.006,07	1.763.516.648,07	Dana Sosial SHU	47.450.458,75	40.792.158,75
Piutang Lain-Lain	375.700,00	375.700,00	Dana Sosial KPRI	17.404.000,00	16.461.000,00
Persediaan ATK	3.312.300,00	3.312.300,00	Pendapatan Diterima Dimuka	213.548.500,00	-
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>2.843.700.619,56</b>	<b>2.632.400.365,53</b>	Simpanan Sukarela	599.410,00	599.410,00
			Dana-Dana Ex. SHU & Cadangan	353.006.757,63	364.746.699,63
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			Hutang Lain-Lain	63.072.726,62	56.414.426,62
Simpanan pada KPRI	15.696.542,00	15.696.542,00	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>761.818.134,37</b>	<b>544.733.976,37</b>
Simpanan pada Bank Bukopin	61.843.718,71	61.843.718,71			
Saham PT Indorayan	15.000.000,00	15.000.000,00	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
<b>Jumlah Investasi J.Panjang</b>	<b>92.540.260,71</b>	<b>92.540.260,71</b>	Penyertaan modal	11.625.000,00	11.625.000,00
<b>Aktiva Tetap</b>			Pinjaman Lembaga lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00
Tanah	-	5.040.000,00	<b>Jumlah Kewajiban J.Panjang</b>	<b>61.625.000,00</b>	<b>61.625.000,00</b>
Inventaris Simpan Pinjam	10.197.150,00	4.197.150,00	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>823.443.134,37</b>	<b>606.358.976,37</b>
Akumulasi Penyusutan Inventaris S/P	(4.197.140,00)	(4.197.140,00)			
Inventaris Unit Toko	5.774.500,00	124.839.700,00	<b>MODAL</b>		
Akumulasi Penyusutan Inventaris U.Toko	(3.874.699,00)	(3.874.699,00)	Simpanan Pokok	14.900.000,00	14.300.000,00
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>7.899.811,00</b>	<b>98.351.311,00</b>	Simpanan Wajib	1.242.197.950,00	1.291.935.041,00
<b>Aktiva Lain-Lain</b>			Simpanan Asset Ruko	9.075.427,48	10.741.018,19
			Simpanan Pemupukan Modal	41.850.887,47	51.782.273,50

Dana Sosial Anggota	-	-	Simpanan Khusus Anggota	20.828.910,00	20.828.910,00
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>2.944.140.691,27</b>	<b>2.823.291.937,24</b>	Simpanan Lain-Lain Modal	16.994.388,18	20.124.723,41
			Donasi/Bantuan Cadangan	201.750.000,00	201.750.000,00
			Modal Tetap	492.282.153,77	462.990.563,77
			Tambahan	7.814.074,00	7.814.074,00
			Laba Tahun Berjalan (SHU)	73.003.766,00	134.666.357,00
			<b>Jumlah Modal</b>	<b>2.120.697.556,90</b>	<b>2.216.932.960,87</b>
			<b>JUMLAH</b>	<b>2.944.140.691,27</b>	<b>2.823.291.937,24</b>
			<b>KEWAJIBAN + MODAL</b>		

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Pada laporan keuangan Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Neraca menyajikan aset lancar, aset tetap, aset lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, investasi jangka panjang dan modal. Neraca mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Kas
2. Bank
3. Piutang usaha dan piutang lain-lain
4. Persediaan ATK
5. Aset tetap;
6. Aset tidak berwujud;
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Ekuitas

## b. Laporan Laba Rugi

**Tabel 4.2**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2020</b>		
	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Pendapatan Jasa Simpan Pinjam	240.246.380,00	283.107.000,00
Penjualan Barang	-	385.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>240.246.380,00</b>	<b>283.492.000,00</b>
<b>Beban Operasional</b>		
<b>Beban Operasi</b>		
Beban Gaji Karyawan	39.600.000,00	37.444.950
Biaya Kebersihan	240.000,00	220.000,00
Jumlah Beban Operasi	39.840.000,00	37.664.950,00
<b>Beban Administrasi &amp; Umum</b>		
Beban Gaji Pengurus	32.900.000,00	29.800.000,00
Beban Gaji Pengawas	18.000.000,00	17.000.000,00
THR Karyawan	3.300.000,00	2.100.000,00
THR Anggota	55.750.000,00	42.250.000,00
THR Pengurus	2.675.000,00	2.025.000,00
THR Pengawas	1.500.000,00	950.000,00
Insentif Bendaharawan Gaji	1.000.000,00	850.000,00
Beban ATK	685.200,00	614.000,00
Beban RAT Tahun Buku	20.000.000,00	18.800.000,00
Biaya Rapat Pengurus	5.000.000,00	5.000.000,00
Biaya Lain-Lain	679.000,00	588.000,00
Jumlah Beban Administrasi & Umum	141.489.200,00	119.977.000,00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>181.329.200,00</b>	<b>157.641.950,00</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>58.917.180,00</b>	<b>125.850.050,00</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		
Pendapatan Jasa Bank	17.720.739,00	11.787.869,00
<b>Beban Non Operasional</b>		
Beban Adm. Bank	3.634.153,00	2.971.562,00
Laba Non Operasional	<b>14.086.586,00</b>	<b>8.816.307,00</b>
<b>Laba Tahun Berjalan (SHU)</b>	<b>73.003.766,00</b>	<b>134.666.357,00</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Pada laporan keuangan Laba Rugi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Laba rugi menyajikan:



1. Pendapatan operasional
2. Pendapatan non operasional
3. Beban administrasi dan umum,
4. Beban non operasional.

**c. Laporan Arus Kas**

**Tabel 4.3**  
**Laporan Arus Kas**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2020</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba Tahun Berjalan (SHU)	Rp 73.003.766,00	
Penurunan Piutang Usaha	Rp 126.993.642,00	
Kenaikan Utang Usaha-Non Anggota	Rp 1.016.000,00	
Kenaikan Dana Sosial SHU	Rp 6.658.300,00	
Kenaikan Dana Sosial KPRI	Rp 943.000,00	
Kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 213.548.500,00	
Penurunan Dana Ex. SHU dan Cadangan	(Rp 11.739.942,00)	
Kenaikan Utang Lain-Lain	Rp 6.658.300,00	
Penyusutan Inventaris Unit Toko	(Rp 22.613.700,00)	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>Rp 394.467.866,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian Inventaris Simpan Pinjam	(Rp 6.000.000,00)	
Penjualan Inventaris Unit Toko	Rp 119.065.200,00	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>Rp 113.065.200,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan Simpanan Pokok	Rp 600.000,00	
Penurunan Simpanan Wajib	(Rp 49.737.091,00)	
Penurunan Simpanan Asset Ruko	(Rp 1.665.590,71)	
Penurunan Simpanan Pemupukan Modal	(Rp 9.931.386,03)	
Penurunan Simpanan Lain-Lain	(Rp 3.130.335,23)	
Kenaikan Cadangan	Rp 29.291.590,00	
Pembagian SHU Tahun Lalu	(Rp 134.666.357,00)	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(Rp 169.239.169,97)</b>
<b>Kenaikan Kas</b>		<b>Rp 338.293.896,03</b>
Kas dan Bank Awal Periode 2020		<b>Rp 865.195.717,46</b>
<b>Kas dan Bank Akhir Periode 2020</b>		<b>Rp 1.203.489.613,49</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Pada Laporan Arus Kas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Laporan arus kas menyajikan 4 bagian yaitu:

1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas investasi
3. Arus kas dari investasi pendanaan
4. Kas dan bank awal dan akhir periode

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

**Tabel 4.4**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2019 DAN 2020</b>		
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Modal Awal Per 1 Januari	2.216.932.960,87	2.264.522.559,56
<b>Penambahan Modal Dari:</b>		
Simpanan Pokok	600.000,00	1.350.000,00
Simpanan Wajib	-	-
Cadangan	29.291.590,00	20.547.580,00
Laba Tahun Berjalan (SHU)	73.003.766,00	134.666.357,00
<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b>102.895.356,00</b>	<b>156.563.937,00</b>
<b>Pengurangan Modal Dari:</b>		
Simpanan Pokok	-	-
Simpanan Wajib	49.737.091,00	94.087.159,00
Simpanan Asset Ruko	1.665.590,71	3.214.769,58
Simpanan Pemupukan Modal	9.931.386,03	16.368.803,46
Simpanan Lain-Lain	3.130.335,23	5.692.490,65
Laba Periode Sebelumnya	134.666.357,00	84.790.313,00
<b>Jumlah Pengurangan Modal</b>	<b>199.130.759,97</b>	<b>204.153.535,69</b>
<b>Modal Akhir 31 Desember</b>	<b>2.120.697.556,90</b>	<b>2.216.932.960,87</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Laporan Ekuitas menyajikan:

1. Modal awal per 1 Januari
2. Penambahan modal dari simpanan, laba tahun berjalan
3. Pengurangan modal dari simpanan, laba periode sebelumnya
4. Modal akhir 31 Desember

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Tabel 4.5**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>			
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2020</b>			
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan			
Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia per 31 Desember 2020, ditutup dengan jumlah Aktiva dan Passiva masing-masing sebesar Rp 2.944.140.691,27, dengan Penjelasan sebagai berikut:			
<b>AKTIVA</b>			
1.1	Kas		Rp 14.625.023,07
	Kas Simpan Pinjam	Rp 7.121.935,20	
	Kas Unit Toko	Rp 1.299.000,00	
	Kas Induk	Rp 6.204.087,87	
1.2	Bank		Rp 1.188.864.590,42
	Bank Sumut	Rp 1.152.526.778,00	
	Tabungan Sikosi	Rp 148.979,42	
	Bank Muamalah	Rp 1.000.000,00	
	Bank BNI	Rp 34.970.276,00	
	Bank BRI	Rp 218.557,00	
1.3	Piutang		Rp 1.636.523.006,07
	Piutang Barang Dagang ATK	Rp 1.086.600,00	
	Piutang Simpan Pinjam	Rp 1.623.620.906,07	
	Piutang Jasa Simpan Pinjam	Rp 11.815.500,00	
1.4	Piutang Lain-Lain		Rp 375.700,00
	Piutang lain-lain 31 Desember 2020		

1.5	Persediaan		Rp	3.312.300,00
	Persediaan barang dagangan ATK 31 Desember 2020			
1.6	Investasi Jangka Panjang		Rp	92.540.260,71
	Simpanan pada PKPRI	Rp	15.696.542,00	
	Simpanan pada Bank Bukopin	Rp	61.843.718,71	
	Saham PT Indorayon	Rp	15.000.000,00	
1.7	Aktiva Tetap			
	Jumlah nilai buku inventaris simpan pinjam 31 Desember 2020, terdiri:		Rp	6.000.010,00
	Nilai Buku	Rp	10.197.150,00	
	Akumulasi Penyusutan	(Rp)	4.197.140,00	
	Jumlah nilai buku inventaris simpan pinjam 31 Desember 2020, terdiri:		Rp	1.899.801,00
	Nilai Buku	Rp	5.774.500,00	
	Akumulasi Penyusutan	(Rp)	3.874.699,00	
	KEWAJIBAN			
1.8	Utang Usaha Non Anggota		Rp	65.690.622,28
	Utang honda LJKK	Rp	337.256,67	
	Utang kesra dinas koperasi	Rp	20.118.500,00	
	Utang kepada PLN	Rp	3.700.000,00	
	Utang kepada PT Angkasa Pura	Rp	1.040.900,00	
	Utang KCK kepada Kandep Kop. Medan	Rp	493.965,61	
	Utang PUK	Rp	40.000.000,00	
1.9	Utang Usaha Anggota		Rp	1.045.659,09
	SHU bagian anggota-Induk	Rp	157.242,00	
	SHU anggota-simpan pinjam	Rp	878.417,09	
	Utang KCK	Rp	10.000,00	
1.10	Dana Sosial SHU		Rp	47.450.458,75
	Dana Sosial SHU-Induk	Rp	3.973.156,75	
	Dana Sosial SHU-Simpan pinjam	Rp	41.671.504,00	
	Dana Sosial SHU-Unit took	Rp	1.805.798,00	
1.11	Dana Sosial PKPRI		Rp	17.404.000,00
	Dana sosial PKPRI-Induk 31 Desember 2020			
1.12	Pendapatan Diterima Dimuka		Rp	213.548.500,00
	Penjualan asset ruko	Rp	310.000.000,00	
	Nilai buku 31 Desember 2019			
	Tanah	-Rp	5.040.000,00	
	Perlengkapan took	-Rp	91.411.500,00	
1.13	Simpanan Sukarela		Rp	599.410,00
	Simpanan Sukarela-Induk 31 Desember 2020			
1.14	Dana-Dana Ex. SHU & Cadangan		Rp	353.006.757,63

	Cadangan dana resiko	Rp	245.180.198,32	
	Cadangan khusus	Rp	38.276.205,00	
	Dana pengawas	Rp	4.000,00	
	Dana pengembangan daerah kerja-Induk	Rp	2.235.011,31	
	Dana pengembangan daerah kerja-Unit Toko	Rp	2.139.619,00	
	Dana pengembangan daerah kerja-Simpan Pinjam	Rp	18.069.824,00	
	Dana sosial anggota	Rp	3.359.110,00	
	Cadangan khusus-Unit Toko	Rp	7.176.108,00	
	Cadangan khusus-Simpan Pinjam	Rp	36.566.682,00	
1.15	Utang Lain-Lain	Rp		63.072.726,62
	Utang lain-lain 31 Desember 2020			
1.16	Kewajiban Jangka Panjang			Rp 61.625.000,00
	Saham PT Indorayon	Rp	11.625.000,00	
	Saham Bukopin	Rp	50.000.000,00	
	MODAL			
1.17	Simpanan Pokok			Rp 14.900.000,00
	Simpanan pokok-Induk 31 Desember 2020			
1.18	Simpanan Wajib			Rp 1.242.197.950,00
	Simpanan wajib-Induk 31 Desember 2020			
1.19	Simpanan Asset Ruko			Rp 9.075.427,48
	Simpanan asset ruko-Induk 31 Desember 2020			
1.20	Simpanan Pemupukan modal			Rp 41.850.887,47
	Simpanan pemupukan modal-Induk 31 Desember 2020			
1.21	Simpanan Khusus Anggota			Rp 20.828.910,00
	Simpanan khusus anggota-Induk 31 Desember 2020			
1.22	Simpanan Lain-Lain			Rp 16.994.388,18
	Simpanan lain-lain-Induk 31 Desember 2020			
1.23	Modal Donasi/Bantuan			Rp 201.750.000,00
	Donasi umum	Rp	8.750.000,00	
	Hibah APBD Provinsi	Rp	100.000.000,00	
	Donasi KCK	Rp	2.000.000,00	
	Donasi dinas koperasi	Rp	26.000.000,00	
	Bantuan modal kerja Menkop	Rp	65.000.000,00	
1.24	Cadangan			Rp 492.282.153,77
	Cadangan-Simpan Pinjam	Rp	271.008.163,92	
	Cadangan SHU	Rp	143.662.445,46	
	Cadangan Ex. SHU KCK	Rp	17.627.120,39	
	Cadangan dividen	Rp	45.574.000,00	
	Cadangan-Unit Toko	Rp	14.410.424,00	

1.25	Pemupukan Modal PUK		Rp	7.814.074,00
	SHU PUK yang tidak dibagi	Rp	6.411.500,00	
	SHU Toko tahun 2014 yang belum dibagi	Rp	1.402.574,00	
1.26	Laba Tahun Berjalan (SHU)		Rp	73.003.766,00
	Laba tahun berjalan 31 Desember 2020			

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menjelaskan pos-pos laporan keuangan dari Neraca 31 Desember 2020, yaitu:

1. Pos-pos Aktiva
2. Pos-pos Kewajiban
3. Pos-pos Modal

### C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis melakukan evaluasi kesesuaian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan SAK ETAP.

#### **1. Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.**

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dilakukan evaluasi kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan cara membandingkan pos-pos laporan keuangan KPRI INSKO dengan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

**a. Perbandingan pencatatan laporan keuangan menurut SAK ETAP dengan pencatatan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.**

SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan mengatur penyusunan laporan keuangan entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan SAK ETAP sebagai standart akuntansi keuangan sendiri mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan pada entitas dalam menyajikan atau mencatat laporan keuangannya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu entitas yang diatur oleh pemerintah untuk menggunakan SAK ETAP dalam pencatatan laporan keuangannya.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif atau Analisa perbandingan yaitu metode analisis yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dengan membandingkan pencatatan laporan keuangan koperasi dengan peraturan pencatatan laporan keuangan menurut SAK ETAP dalam melihat hasil kesesuaiannya.

Berikut adalah tabel perbandingan pencatatan laporan keuangan menurut SAK ETAP dan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan pencatatan laporan keuangan menurut SAK ETAP dengan**  
**pencatatan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)**  
**INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

No	Item	SAK ETAP	Paragraf	KPRI INSKO	Penyajian		Keterangan
					Sesuai	Tidak Sesuai	
<b>A. Neraca</b>							
1	Dasar Pencatatan	Dasar pencatatan neraca menggunakan metode akrual	Paragraf 2.33	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan dasar akrual karena akun utang dan piutang	√		Sebagai dasar pencatatan KPRI INSKO telah sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi kriteria persyaratan
2	Aset	Aset minimal menyajikan akun sebagai berikut : a. kas dan setara b. piutang usaha dan piutang lainnya c. persediaan d. proverti investasi e. aset tetap f. aset tidak berwujud	Paragraf 4.2	Laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyajikan akun-akun: a. kas, bank b. Persediaan ATK c. Piutang lain-lain d. Tanah e. inventaris simpan pinjam dan inventaris unit toko f. Aset lain-lain	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi kriteria persyaratan



3	Kewajiban	kewajiban minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. utang usaha dan utang lainnya b. aset dan kewajiban pajak c. kewajiban diestimasi	Paragraf 4.2	Laporan keuangan KPRI INSKO menyajikan akun-akun: a. Hutang usaha dan lainnya b. tabungan sikosi		√	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena di Koperasi Pegawai Republik Indonesia INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat pos hutang pajak dalam neraca
4	Ekiutas	Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas	paragraf 4.3	Neraca KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyajikan pos judul dan sub jumlah. Penyajian tersebut relevan dengan klasifikasi yang jelas	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi kriteria persyaratan
5	Klasifikasi aset dan kewajiban	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi andal dan lebih relevan	Paragraf 4.5	Laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah menyajikan aset lancar, Kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang relevan		√	Tidak sesuai karena klasifikasi aset dengan nama "investasi" dibawah aset lancar dan diatas aset lain-lain maka sifat aset dalam klasifikasi tersebut tidak disajikan berdasarkan likuiditas

<b>B. Laporan Laba Rugi</b>							
1	Informasi yang disajikan	Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut : a. Pendapatan Beban keuangan b. beban pajak d. Laba atau rugi neto	Paragraf 5.3	Laporan laba rugi KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan jasa simpan pinjam b. pendapatan beban operasional c. pendapatan beban Administrasi dan umum d. pendapatan dan beban non operasional		√	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena di KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat akun beban pajak
2	Informasi yang disajikan	Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas	Paragraf 5.4	Pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi telah disajikan dengan relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan		√	Sesuai dengan SAK ETAP karena informasi yang disajikan memenuhi syarat
<b>C. Laporan Perubahan Ekuitas</b>							
1	Informasi yang disajikan	Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang mencakup : a. Laba atau rugi untuk periode b. pendapatan dan beban yang diakui ekuitas	Paragraf 6.3	Laporan perubahan ekuitas yang disajikan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang disajikan mencakup: a. Laba Tahun Berjalan (SHU) b. Laba Periode Sebelumnya		√	Sesuai dengan SAK ETAP karena yang disajikan telah memenuhi persyaratan

<b>D. Laporan Arus Kas</b>							
1	Informasi yang disajikan	Entita menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan klasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan	Paragraf 7.3	KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah menyajikan laporan arus kas dengan klasifikasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yaitu klasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena klasifikasi laporan arus kas koperasi disajikan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
2	Aktivitas Operasi	Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas	Paragraf 7.4	Arus kas dari aktivitas operasi didapat dari aktivitas utama koperasi diantaranya SHU dan arus kas simpan pinjam dan inventaris unit toko	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama koperasi.
3	Aktivitas Investasi	Arus kas dari aktivitas investasi menganut tentang pengeluaran kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan	Paragraf 7.5	Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas dengan tujuan memperoleh pendapatan dan arus kas masa depan yaitu pembelian atau penjualan aktiva tetap	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena tujuan arus kas investasi telah memenuhi persyaratan SAK ETAP

4	Aktivitas Pendanaan	Arus kas dapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan pelunasan pinjaman	Paragraf 7.6	Arus kas koperasi berasal dari pemasukan SHU dan pembayaran simpanan	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena telah memenuhi persyaratan
<b>E. Catatan Atas Laporan Keuangan</b>							
1	Struktur	Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan b. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan c. pengungkapan lain.	Paragraf 8.4	Penyajian catatan Atas Laporan Keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara hanya penjelasan pos-pos laporan keuangan		√	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.
2	Pengungkapan kebijakan akuntansi	Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus memberikan informasi dasar pengukuran yang relevan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan	Paragraf 8.5	Laporan Keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak ada ringkasan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan		√	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak memberikan informasi yang di syaratkan sesuai dengan catatan atas laporan keuangan

							menurut SAK ETAP
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

(Sumber: Laporan Keuangan SAK ETAP dan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

**b. Analisis perbandingan pencatatan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan laporan keuangan menurut SAK ETAP**

**1) Neraca**

Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyajikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam SAK ETAP yang menyajikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada waktu periode tertentu yaitu bulan Desember yang diakui sebagai akhir periode laporan.

**a) Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas.<sup>1</sup> Aset diakui di dalam neraca karena manfaat ekonominya di masa depan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut SAK ETAP, aset minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut : kas dan setara kas, piutang usaha dan lainnya, persediaan, proverti investasi, aset tetap dan aset tidak berwujud.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyajikan pos-pos sebagai berikut: kas, bank (kas dan setara kas), piutang lain-lain (piutang usaha dan lainnya), persediaan ATK (persediaan), tanah, inventaris simpan pinjam, inventaris unit toko (aset tetap) dan aset lain-lain (aset tidak berwujud).

---

<sup>1</sup>DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta, IAI, 2016) Paragraf 2.12

Pos-pos tersebut telah memenuhi kriteria minimal SAK ETAP, sehingga penyajian aset dalam neraca KPRI INSKO telah sesuai dengan SAK ETAP.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang masa kini koperasi yang timbul dari peristiwa masa lampau dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dan sumber daya milik koperasi dan mengandung manfaat ekonomi.

Menurut SAK ETAP, kewajiban minimal menyajikan pos-pos meliputi: utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, dan kewajiban diestimasi. KPRI INSKO menyajikan kewajiban dengan pos-pos meliputi: Utang usaha dan utang lainnya dan tabungan sikosi. Tidak terdapat akun kewajiban diestimasi dan akun aset dan kewajiban pajak dalam kewajiban neraca koperasi. Maka penyajian kewajiban dalam neraca pada laporan keuangan KPRI INSKO tidak sesuai dengan SAK ETAP.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset KPRI INSKO setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas/modal yang disajikan oleh KPRI INSKO dalam laporan keuangannya terdiri dari: Modal simpanan, modal khusus anggota dan selisih pendapatan dengan biaya.

Menurut SAK ETAP, entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas maka koperasi telah menyajikan pos judul dan sub jumlah lainnya dengan jelas dan relevan. Sehingga penyajian ekuitas dalam neraca KPRI INSKO telah sesuai dengan SAK ETAP.

d) Klasifikasi aset dan kewajiban

Menurut SAK ETAP, entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

Panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan.

KPRI INSKO telah menyajikan aset lancar, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan namun KPRI INSKO menyajikan dalam aset dengan nama (investasi) dibawah aset lancar dan diatas aset lain-lain. Maka pengelompokkan tidak diklasifikasi sesuai likuiditas, sehingga klasifikasi aset dan kewajiban tidak sesuai dengan SAK ETAP.

## **2) Laporan laba rugi**

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban koperasi dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan beban operasional dan non operasional.

Menurut SAK ETAP. Laporan laba rugi entitas mencakup minimal pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuntungan, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Laporan laba rugi KPRI INSKO belum mencakup semua pos-pos yang telah disyaratkan oleh SAK ETAP. Koperasi INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara hanya menyajikan pos-pos pada laporan laba rugi meliputi pendapatan jasa simpan, pendapatan jasa bank (pendapatan). Biaya gaji karyawan, biaya kebersihan, biaya administrasi, biaya rapat pengurus dan biaya lain-lain (beban keuntungan), tetapi tidak terdapat beban pajak. Sehingga KPRI INSKO dalam pencatatannya belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena di KPRI INSKO tidak pernah telat pajak atau nunggak pajak setiap tahunnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 September 2021.

Selain itu, SAK ETAP mempunyai syarat agar entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas, laporan laba rugi KPRI INSKO telah disajikan dengan relevan dan sesuai kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dengan sepenuhnya ketentuan SAK ETAP, maka penyajian laporan laba rugi KPRI INSKO telah sesuai dengan SAK ETAP.

### **3) Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas koperasi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto (kekayaan) koperasi selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas disajikan oleh koperasi dengan judul laporan perubahan modal.

Menurut SAK ETAP, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode pelaporan serta pendapatan dan beban yang diakui dalam ekuitas. Laporan perubahan modal koperasi meliputi: Laba tahun berjalan (SHU) (laba rugi periode pelaporan) dan laba periode sebelumnya (beban yang diakui langsung dalam ekuitas). Dengan demikian, semua persyaratan dalam SAK ETAP telah terpenuhi, sehingga penyajian laporan perubahan ekuitas telah sesuai dengan SAK ETAP.

### **4) Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Menurut SAK ETAP, entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaa. KPRI INSKO telah mengelompokkan menjadi 3 arus kas yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.



a) **Aktivitas Operasi**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan koperasi dimana arus kas dari operasi usaha dan kegiatan simpan pinjam anggota disajikan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Menurut SAK ETAP, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Arus kas aktivitas operasi KPRI INSKO terutama diperoleh dari penghasil atau SHU (Per SHU 31 Desember 2020), dan kegiatan simpan pinjam (pos kenaikan simpanan khusus seperti kenaikan dana-dana sosial). Jadi, pos-pos yang disajikan KPRI INSKO telah memenuhi syarat SAK ETAP. Sehingga penyajian aktivitas operasi dalam laporan arus kas sudah sesuai dengan SAK ETAP.

b) **Aktivitas Investasi**

Menurut SAK ETAP, arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa yang akan datang. Beberapa contoh pos arus kas dari aktivitas investasi KPRI INSKO yang mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan antara lain : pembelian inventaris simpan pinjam dan penjualan inventaris unit toko. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, arus kas investasi dalam penyajiannya telah sesuai dengan SAK ETAP.

c) **Aktivitas Pendanaan**

SAK ETAP menjelaskan arus kas (aktivitas pendanaan) yang didapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan pelunasan pinjaman. Beberapa contoh pos arus kas aktivitas pendanaan KPRI INSKO antara lain: kenaikan cadangan (penerimaan kas), pembagian SHU tahun lalu (pembayaran kas), serta kenaikan simpanan (pelunasan pinjaman). Dengan terpenuhi pos-pos yang menjadi

syarat oleh SAK ETAP, maka penyajian aktivitas pendanaan di laporan arus kas KPRI INSKO telah sesuai dengan SAK ETAP.

Dengan demikian secara menyeluruh item-item yang telah dijelaskan tersebut diperbandingkan dalam laporan arus kas laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara disajikan sesuai dengan ketentuan dalam item yang diperbandingkan tersebut, sehingga arus kas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan SAK ETAP.

#### **5) Catatan Atas Laporan Keuangan**

Paragraf 8.1 SAK ETAP menjelaskan Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

Menurut SAK ETAP, Catatan atas laporan keuangan secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, pengungkapan lain. KPRI INSKO hanya menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan saja sebagai bentuk catatan atas laporan keuangannya tidak ada gambaran umum perusahaan dan ringkasan kebijakan akuntansi. Karena catatan atas laporan keuangan yang dibuat hanya untuk kebutuhan koperasi saja dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).<sup>3</sup> Dengan demikian Catatan atas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan SAK ETAP.

---

<sup>3</sup>*Ibid*

Pembahasan Catatan Atas Laporan Keuangan diatas merupakan pembahasan naratif yang terakhir dalam bab ini, berikut adalah tabel rekapitulasi kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SAK ETAP untuk menutupi pembahasan.

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Koperasi**  
**Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM**  
**Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SAK ETAP**

No	Komponen Laporan Keuangan	Jumlah rekomendasi SAK ETAP	Sesuai dengan SAK ETAP	Tidak sesuai dengan SAK ETAP
1	Neraca	5	3	2
2	Laporan Laba Rugi	2	1	1
3	Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	0
4	Laporan Arus Kas	4	4	0
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	2	0	2
<b>Jumlah</b>		14	9	5
<b>Persentase</b>		<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>36%</b>

(Sumber : Laporan Keuangan KPRI INSKO berdasarkan SAK ETAP)

Laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memenuhi 9 (Sembilan) dari total 14 (empat belas) jumlah rekomendasi SAK ETAP. Menjadikan angka kesesuaian 64%. Dengan demikian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dalam segi pencatatannya berdasarkan SAK ETAP.

Terdapat 34% yang tidak sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yaitu yang pertama dari Neraca (tidak adanya akun aset dan kewajiban pajak dan klasifikasi aset yang tidak diurutkan

berdasarkan likuiditas) dan pada Laporan laba rugi (tidak adanya akun beban pajak dalam laporan laba rugi) dan yang terakhir Catatan atas laporan keuangan (tidak ada gambaran umum perusahaan dan tidak disajikannya ringkasan kebijakan akuntansi).

## **2. Kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP terkait dengan penyajian laporan keuangan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara**

Evaluasi kesesuaian pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Terdapat kendala dalam terkait penyajian laporan keuangannya, diantaranya:

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada koperasi terhadap pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP sehingga pihak koperasi belum mengetahui secara lengkap tentang laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP karena tidak di dukung latar belakang pendidikan akuntansi.
2. Belum adanya pelatihan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mengenai pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
3. Tidak adanya aturan khusus dari pusat untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini yang menjadikan laporan keuangan yang disajikan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam pencatatan laporan keuangannya berdasarkan kesepakatan antara pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal dalam koperasi karena setiap tahunnya koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ishak Bancin, Manajer (Pelaksana Usaha) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 September 2021.

4. Tidak terdapat bagian khusus di bidang Akuntansi untuk menangani laporan keuangan. Semua dilakukan oleh bendahara yang merangkap beberapa fungsi tugas. Hal ini juga yang mengakibatkan catatan atas laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada ringkasan kebijakan akuntansi didalamnya yang menyajikan secara wajar posisi keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan:

1. Evaluasi kesesuaian Pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Dari 14 (empat belas) kategori, terdapat 5 (lima) kategori yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP, diantaranya:
  - a. Pada pos neraca tidak adanya akun aset dan kewajiban pajak dan klasifikasi aset yang tidak diurutkan berdasarkan likuiditas yaitu adanya klasifikasi aset dengan nama "investasi" dibawah aset lancar dan diatas aset lain-lain maka sifat aset dalam klasifikasi tersebut tidak disajikan berdasarkan likuiditas.
  - b. Pada pos laporan laba rugi (tidak adanya akun beban pajak) karena koperasi belum pernah mengalami pajak yang lebih atau kurang bayar, sehingga aset dan kewajiban pajak tidak pernah diakui).
  - c. Pada pos catatan atas laporan keuangan (tidak ada gambaran umum perusahaan dan tidak disajikannya ringkasan kebijakan akuntansi) karena Karena catatan atas laporan keuangan yang dibuat hanya untuk kebutuhan koperasi saja dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sudah disepakati oleh pengguna laporan keuangan.

2. Terdapat kendala dalam penerapan SAK ETAP di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada proses penyajian laporan keuangannya, diantaranya :
  - a. Masih kurangnya sosialisasi kepada koperasi terhadap pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
  - b. Belum adanya pelatihan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Tidak adanya aturan khusus dari pusat untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
  - d. Tidak terdapat bagian khusus di bidang Akuntansi untuk menangani laporan keuangan. Semua dilakukan oleh bendahara yang merangkap beberapa fungsi tugas.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang diberikan :

- a. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan dapat terus mematuhi Peraturan Pemerintah dalam menerapkan SAK ETAP sebagai pedoman laporan keuangan serta terus meningkatkan kualitas penyajian laporan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara di harapkan juga mempunyai akun aset dan kewajiban pajak agar tidak terjadi salah saji apabila terjadi pajak yang lebih atau kurang bayar. Selain itu, koperasi sebaiknya menyajikan aset dalam klasifikasi “investasi” diurutkan berdasarkan likuiditas agar sesuai dengan SAK ETAP. Dan yang terakhir sebaiknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada catatan atas laporan keuangan mempunyai gambaran umum perusahaan dan ringkasan kebijakan akuntansi agar

laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

b. Bagi penulis selanjutnya

Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya lebih banyak mencari sumber lain untuk menganalisis hambatan dalam pencatatan laporan keuangan SAK ETAP dan melakukan wawancara dengan bagian keuangan. Selain itu, peneliti menyarankan untuk memberi informasi tambahan dalam penelitian agar bisa menilai seberapa baik kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP



## DAFTAR PUSTAKA

- Andjar, Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Anggadini Sri Dewi, Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2017
- Askari M. Zakariah, et. al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Development (R and D)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020
- Apriani Linda, Skripsi: “*Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)*”, Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Bahri Syaiful, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2016
- *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.
- Bancin Ishak, Manajer (Pelaksana Usaha) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 September 2021
- Basyarullah Rezka, Skripsi: “*Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Pada Klinik Musik Surabaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*”, Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surabaya, 2018
- DSAK IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta, IAI, 2016
- Hafid Kumala Sari, dkk, “*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM. Buton, (Volume 1 Nomor 1 – Desember 2019), 2019, 65-82
- Hariwijaya. M, *Metodologi dan Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi*, Jakarta: Diandra Kreatif, 2017
- Heriyanto, Aan Prabowo “*Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik ( E-Book ) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Semarang*”, Jurnal Ilmu Perpustakaan (Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-9

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016
- Juju Suryawati dan Kun Maryati *Sosiologi:-Jilid 3*, (Jakarta: ESIS, 2006), h.110
- Kartasapoetra,dkk, *Koperasi Indonesia* Jakarta:Rineka Cipta,2003
- Lamonisi Sony “*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon*”, Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 223-230
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Jakarta : PT. Intermesa
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,Prenadamedia Group, 2012
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020
- Mulyani, Skripsi: *Analisis Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang*, Tanjung Pinang:Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2013
- Munawir,*Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty,2017
- Nurdita , J S Raflesia, Jurnal: *Analisis Penerapan Standart Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP)*, Koperasi Kota Dumai, Riau :Universitas Riau, 2013
- Nurlaila., dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Medan : Madenatera,2019
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
- Qomusuddin Ivan Fanani, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2019
- QS. Al-Baqarah (2) : 282
- QS. Al-Maidah (5) :2
- QS. Al- Mudatsir (74) : 38
- QS. Al-Qiyamah (75) : 36
- QS. Sad (38): 24

- Rahmadi, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Grasindo, 2010
- Safri Sofyan, *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish, Januari 2017
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2016.
- Septariani Jumania “*Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR) Vol. 2 No. 1, Desember 2018, 32-51 etiyowati Supami Wahyu et, al., *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP* Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018
- Sitanggang Sirius, et, al, *Panduan Akuntansi Keuangan Bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Sri Hartati, Ismail Nurdin *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019
- Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu, 2003
- Tarigan Azhari Akmal, *Pengantar Teologi Ekonomi*, FEBI UIN-SU Press, 2014
- Teungku Muhammad Hasbi asd-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Jakarta : Cakrawala, 2011
- Triana, Rindi, Jurnal: *Analisis Pemanfaatan Dana dan Akuntabilitas Koperasi Mahasiswa Citra Dana Undiksha Singaraja*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2012
- Trivena Shinta Maharani, “*Evaluasi Pencatatan Laporan Keuangan Pada Ukm Rizprod Equipment Sesuai Dengan SAK ETAP*”, Jurnal Administrasi dan Bisnis, (Volume:11, Nomor:2, Desember 2017), 2018, 213-220
- Waluya Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT.Grafindo Media Pratama, 2007

Wahyuni Arnida, *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*, Medan: FEBI UIN Sumatera Utara, 2018

Weygandt, Kieso, *Intermediate Accounting*, Volume I IFRS Edition ,United State Of America,2011

Zainal, “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada KSU Sumber Rezeki Kota Binjai’, Teknik Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering, 3 (2) November 2019), 2019, 104-112

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  
INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI ENSKO) NERACA GABUNGAN PERIODE 31 DESEMBER 2019				
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>AKTIVA</b>				
<b>Aktiva Lancar</b>				
Kas	14.821.022,37	12.008.773,04		
Bank	1.188.868.706,42	833.180.802,42	83.480.622,28	84.674.622,28
Piutang Usaha	3.836.523.896,27	1.768.870.848,97	1.041.889,00	1.041.889,00
Piutang Lain-Lain	373.700,00	371.780,00	47.450.476,71	40.782.138,75
Persediaan ATK	1.312.300,00	731.2.310,00	17.464.000,00	16.481.000,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>2.841.795.619,06</b>	<b>2.432.890.349,43</b>	<b>211.244.208,00</b>	<b>144.100,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>				
Simpanan pada KPRI	15.889.542,00	15.889.542,00	799.410,00	999.410,00
Simpanan pada Bank Indonesia	61.843.719,71	61.843.719,71	123.000.707,63	364.740.000,00
Suban PT Indonesia	15.883.000,00	15.883.000,00	63.073.736,62	58.414.428,62
<b>Jumlah Investasi J. Panjang</b>	<b>93.616.261,71</b>	<b>93.616.261,71</b>	<b>785.473.854,25</b>	<b>864.153.838,62</b>
<b>Aktiva Tetap</b>				
Tanah	5.942.000,00	5.942.000,00		
Investasi Properti Fisik	10.187.180,00	4.197.139,00		
Akumulasi Penyusutan - Investasi SP	(8.197.140,00)	(8.197.140,00)		
Investasi Usah Taku	2.796.300,00	124.433.700,00		
Akumulasi Penyusutan Investasi U. Taku	(1.874.894,00)	(1.874.894,00)		
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>7.893.816,00</b>	<b>98.201.311,00</b>		
<b>AKTIVA Lain-Lain</b>				
Data Sosial Anggota				
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2.941.145.697,77</b>	<b>2.621.291.922,14</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>Kewajiban Lancar</b>				
Hutang Usaha			43.480.622,28	84.674.622,28
Tanggung Jawab			1.041.889,00	1.041.889,00
Data Sosial SP			47.450.476,71	40.782.138,75
Data Sosial KPRI			17.464.000,00	16.481.000,00
Pendapatan Utangannya (Utang)			211.244.208,00	-
Simpanan Salurannya			799.410,00	999.410,00
Data-Dana Ex. SHU & Cadangan			123.000.707,63	364.740.000,00
Hutang Lain-Lain			63.073.736,62	58.414.428,62
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>			<b>785.473.854,25</b>	<b>864.153.838,62</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>				
Penyusutan, modal dan Pasiva			11.423.000,00	11.423.000,00
Reservasi Lembaga Keuangan			51.010.000,00	51.010.000,00
<b>Jumlah Kewajiban J. Panjang</b>			<b>62.433.000,00</b>	<b>62.433.000,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>			<b>847.906.854,25</b>	<b>926.586.838,62</b>
<b>MODAL</b>				
Simpanan Pokok			14.900.000,00	14.200.000,00
Simpanan Wajib			1.242.187.810,00	1.231.885.000,00
Simpanan Asas Risiko			8.071.421,48	10.741.518,19
Simpanan Penghasilan Mula			41.875.887,47	31.782.273,50
Simpanan Klaim Simpanan			30.828.840,00	20.828.710,00
Simpanan Lain-Lain			16.994.388,18	20.124.723,41
Modal Utangannya			261.730.000,00	231.786.000,00
Cadangan			482.282.110,71	462.286.563,27
Modal Yang Berhak			7.814.274,00	7.814.074,00
Lain-Lain Berhak (SHU)			71.083.766,00	134.688.157,00
<b>Jumlah Modal</b>			<b>2.129.697.566,96</b>	<b>2.216.631.868,37</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Modal</b>			<b>2.941.145.697,77</b>	<b>2.621.291.922,14</b>

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI ENSKO) LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2020		
	31 Desember 2019	31 Desember 2019
	Rp	Rp
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Pendapatan Jasa Simpanan Pasif	240.246.380,00	283.107.000,00
Pendapatan Hibung	-	365.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>240.246.380,00</b>	<b>283.492.000,00</b>
<b>Beban Operasional</b>		
<b>Beban Operasional</b>		
Beban Biaya Karyawan	39.600.000,00	37.444.950
Biaya Subsidi	240.000,00	220.000,00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>39.840.000,00</b>	<b>37.664.950,00</b>
<b>Beban Administrasi &amp; Umum</b>		
Beban Biaya Pengurusan	22.500.000,00	29.800.000,00
Beban Biaya Pengurusan	18.000.000,00	17.000.000,00
USBU Karyawan	3.700.000,00	3.400.000,00
USBU Anggota	53.784.000,00	42.250.000,00
USBU Pengurusan	2.275.000,00	2.625.000,00
USBU Pengurusan	1.500.000,00	950.000,00
Biaya/ Biaya-biaya Lain	1.000.000,00	850.000,00
Beban ATK	485.200,00	614.000,00
Beban B.A.T. Tahun Berhak	20.000.000,00	18.300.000,00
Beban Biaya Pengurusan	3.000.000,00	3.000.000,00
Beban Lain-Lain	679.000,00	348.000,00
<b>Jumlah Beban Administrasi &amp; Umum</b>	<b>141.489.200,00</b>	<b>119.977.000,00</b>
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>181.329.200,00</b>	<b>157.641.950,00</b>
<b>Labas Operasional</b>	<b>58.917.180,00</b>	<b>125.850.050,00</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		
Pendapatan Jasa Bank	17.320.750,00	11.787.860,00
<b>Beban Non Operasional</b>		
Beban Adm. Bank	3.034.153,00	2.971.562,00
<b>Labas Non Operasional</b>	<b>14.286.596,00</b>	<b>8.816.297,00</b>
<b>Labas Tahun Berjalan (SHU)</b>	<b>73.203.776,00</b>	<b>134.666.347,00</b>

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2020</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba Tahun Berjalan (SHU)	Rp 73.003.766,00	
Pemertanan Pinang Usaha	Rp 126.993.642,00	
Kenaikan Utang Usaha-Non Anggota	Rp 1.016.000,00	
Kenaikan Dana Sosial SHU	Rp 6.658.300,00	
Kenaikan Dana Sosial PKPRI	Rp 943.000,00	
Kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 213.548.500,00	
Pemertanan Dana Ex. SHU dan Cadangan	(Rp 11.739.942,00)	
Kenaikan Utang Lain-Lain	Rp 6.658.300,00	
Perystunan Inventaris Unit Toko	(Rp 22.613.700,00)	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>Rp 394.467.866,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian Inventaris Simpan Pinjam	(Rp 6.000.000,00)	
Penjualan Inventaris Unit Toko	Rp 119.065.200,00	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pemanaan</b>		<b>Rp 113.065.200,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan Simpanan Pokok	Rp 600.000,00	
Pemertanan Simpanan Wajib	(Rp 49.737.091,00)	
Pemertanan Simpanan Asset Ruko	(Rp 1.665.590,71)	
Pemertanan Simpanan Pemupukan Modal	(Rp 9.931.386,03)	
Pemertanan Simpanan Lain-Lain	(Rp 3.130.335,23)	
Kenaikan Cadangan	Rp 29.291.590,00	
Pembagian SHU Tahun Lalu	(Rp 134.666.357,00)	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(Rp 169.239.169,97)</b>
<b>Kenaikan Kas</b>		<b>Rp 338.293.896,03</b>
Kas dan Bank Awal Periode 2020		Rp 865.195.717,46
<b>Kas dan Bank Akhir Periode 2020</b>		<b>Rp 1.203.489.613,49</b>

<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN MODAL</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2019 DAN 2020</b>		
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Modal Awal Per 1 Januari	2.216.932.960,87	2.264.522.559,56
<b>Penambahan Modal Dari:</b>		
Simpunan Pokok	600.000,00	1.350.000,00
Simpunan Wajib	-	-
Cadangan	29.291.590,00	20.547.580,00
Laba Tahun Berjalan (SHU)	73.003.766,00	134.666.357,00
<b>Tambahan Modal Disetur</b>	<b>102.895.356,00</b>	<b>156.563.937,00</b>
<b>Pengurangan Modal Dari:</b>		
Simpunan Pokok	-	-
Simpunan Wajib	49.737.091,00	94.087.159,00
Simpunan Aset Ruko	1.665.590,71	3.214.769,58
Simpunan Penyusutan Modal	9.931.386,03	16.368.803,46
Simpunan Lain-Lain	3.130.335,23	5.692.490,65
Laba Periode Sebelumnya	134.666.357,00	84.790.313,00
<b>Jumlah Pengurangan Modal</b>	<b>199.130.759,97</b>	<b>204.153.535,69</b>
<b>Modal Akhir 31 Desember</b>	<b>2.120.697.556,90</b>	<b>2.216.932.960,87</b>



**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI INSKO)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PERIODE 31 DESEMBER 2020**

**Pengelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia per 31 Desember 2020, ditutup dengan jumlah Aktiva dan Passiva masing-masing sebesar Rp 2.944.140.691,27, dengan Pengelasan sebagai berikut:

<b>AKTIVA</b>		<b>Rp. 14.625.023,07</b>
1.1	<b>Kas</b>	
	Kas Simpan Pinjam	Rp 7.121.935,20
	Kas Ubit Toko	Rp 1.299.000,00
	Kas Induk	Rp 6.204.087,87
		<b>Rp 1.188.864.590,42</b>
1.2	<b>Bank</b>	
	Bank Sumut	Rp 1.152.526.778,00
	Tabung Sikas	Rp 148.979,42
	Bank Muamalat	Rp 1.000.000,00
	Bank BNI	Rp 34.970.270,00
	Bank BRI	Rp 218.557,00
		<b>Rp 1.636.523.006,07</b>
1.3	<b>Pinang</b>	
	Pinang Barang Dagang ATK	Rp 1.086.600,00
	Pinang Simpan Pinjam	Rp 1.623.620.906,07
	Pinang Jasa Simpan Pinjam	Rp 11.815.500,00
		<b>Rp 375.700,00</b>
1.4	<b>Pinang Lain-Lain</b>	
	Pinang lain-lain 31 Desember 2020	
		<b>Rp 3.312.300,00</b>
1.5	<b>Perediaan</b>	
	Perediaan barang dagangan ATK 31 Desember 2020	
		<b>Rp 92.540.260,71</b>
1.6	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	
	Simpanan pada PKPRI	Rp 15.696.542,00
	Simpanan pada Bank Bukopin	Rp 61.843.718,71
	Saham PT Indosatyon	Rp 15.000.000,00
		<b>Rp 6.000.010,00</b>
1.7	<b>Aktiva Tetap</b>	
	Jumlah nilai buku inventaris simpan pinjam 31 Desember 2020, terdiri:	
	Nilai Buku	Rp 10.197.150,00
	Akumulasi Penyusutan	(Rp 4.197.140,00)
	Jumlah nilai buku inventaris simpan pinjam 31 Desember 2020, terdiri:	<b>Rp 1.899.801,00</b>
	Nilai Buku	Rp 5.774.500,00
	Akumulasi Penyusutan	(Rp 3.874.699,00)
		<b>Rp 65.690.622,28</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	
1.8	<b>Utang Usaha Non Anggota</b>	
	Utang usaha LJKK	Rp 337.256,67
	Utang usaha dinas koperasi	Rp 20.118.500,00
	Utang kepada PLN	Rp 3.700.000,00
	Utang kepada PT Angkasa Pura	Rp 1.040.900,00
	Utang KCK kepada Kandep Kop. Medan	Rp 493.965,61
	Utang PUK	Rp 40.000.000,00

1.9	Utang Usaha Anggota		Rp	1.045.659,09
	SHU bagian anggota-Induk	Rp	157.242,00	
	SHU anggota-simpan pinjam	Rp	878.417,09	
	Utang KCK	Rp	10.000,00	
1.10	Dana Sosial SHU		Rp	47.450.458,75
	Dana Sosial SHU-Induk	Rp	3.973.156,75	
	Dana Sosial SHU-Simpan pinjam	Rp	41.671.504,00	
	Dana Sosial SHU-Unit toko	Rp	1.805.798,00	
1.11	Dana Sosial PKPRI		Rp	17.404.000,00
	Dana sosial PKPRI-Induk 31 Desember 2020			
1.12	Pendapatan Diterima Dimuka		Rp	213.548.500,00
	Penjual aset ruko	Rp	310.000.000,00	
	Nilai buku 31 Desember 2019			
	Tanah	-Rp	5.040.000,00	
	Pelengkapan toko	-Rp	91.411.500,00	
1.13	Simpunan Sikarela		Rp	599.410,00
	Simpunan Sikarela-Induk 31 Desember 2020			
1.14	Dana-Dana Ex. SHU & Cadangan		Rp	353.006.757,63
	Cadangan dana resiko	Rp	245.180.198,32	
	Cadangan khusus	Rp	38.276.205,00	
	Dana pegawai	Rp	4.000,00	
	Dana pengembangan daerah kerja-Induk	Rp	2.235.011,31	
	Dana pengembangan daerah kerja-Unit Toko	Rp	2.139.619,00	
	Dana pengembangan daerah kerja-Simpan Pinjam	Rp	18.069.824,00	
	Dana sosial anggota	Rp	3.359.110,00	
	Cadangan khusus-Unit Toko	Rp	7.176.108,00	
	Cadangan khusus-Simpan Pinjam	Rp	36.566.682,00	
1.15	Utang Lain-Lain		Rp	63.072.726,62
	Utang lain-lain 31 Desember 2020			
1.16	Kewajiban Jangka Panjang		Rp	61.625.000,00
	Saham PT Indorcyon	Rp	11.625.000,00	
	Saham Bukopin	Rp	50.000.000,00	
	MODAL			
1.17	Simpunan Pokok		Rp	14.900.000,00
	Simpunan pokok-Induk 31 Desember 2020			
1.18	Simpunan Wajib		Rp	1.242.197.950,00
	Simpunan wajib-Induk 31 Desember 2020			
1.19	Simpunan Asset Ruko		Rp	9.075.427,48
	Simpunan aset ruko-Induk 31 Desember 2020			
1.20	Simpunan Pemupukan modal		Rp	41.850.887,47
	Simpunan pemupukan modal-Induk 31 Desember 2020			
1.21	Simpunan Khusus Anggota		Rp	20.828.910,00
	Simpunan khusus anggota-Induk 31 Desember 2020			

1.22	Simpunan Lain-Lain		Rp	16.994.388,18
	Simpunan lain-lain-Induk 31 Desember 2020			
1.23	Modal Donasi/Bantuan		Rp	201.750.000,00
	Donasi umum	Rp	8.750.000,00	
	Hibah APBD Provinsi	Rp	100.000.000,00	
	Donasi KCK	Rp	2.000.000,00	
	Donasi simas koperasi	Rp	26.000.000,00	
	Bantuan modal kerja Mewkop	Rp	65.000.000,00	
1.24	Cadangan		Rp	492.282.153,77
	Cadangan-Simpan Pinjam	Rp	271.008.163,92	
	Cadangan SHU	Rp	143.662.445,46	
	Cadangan Ex. SHU KCK	Rp	17.627.120,39	
	Cadangan dividen	Rp	45.574.000,00	
	Cadangan-Unit Toko	Rp	14.410.424,00	
1.25	Pemupukan Modal PUK		Rp	7.814.074,00
	SHU PUK yang tidak dibagi	Rp	6.412.500,00	
	SHU Toko tahun 2014 yang belum dibagi	Rp	1.402.574,00	
1.26	Laba Tahun Berjalan (SHU)		Rp	73.003.766,00
	Laba tahun berjalan 31 Desember 2020			

## Lampira 2 : Daftar Stok Barang

DAFTAR STOK BARANG KPRI INSKO PER 13 SEPTEMBER 2020					
NO	NAMA BARANG	Jumlah	Satuan	HARGA SATU	JUMLAH HARGA
				RP	
1	Buku Tulis 50 lbr	8	bn	1,500.00	12,000.00
2	Weglar HD 10	17	bn	13,500.00	229,500.00
3	Pulpen Fastar	18	bn	1,500.00	27,000.00
4	Klip Kartas	22	KKj	1,500.00	33,000.00
5	Pulpen Line-T 20	23	Bh	5,000.00	115,000.00
6	Poko Cutter	1	Bh	1,250.00	1,250.00
7	Pulpen AE 7 Standant	15	Bh	1,250.00	18,750.00
8	Pulpen Nobel 1.0	11	bn	5,500.00	60,500.00
9	Penghapus stetler	50	bn	2,200.00	110,000.00
10	Klip Sinder n0 200	0	KKj	11,000.00	-
11	Klip Sinder 155	0	KKj	10,000.00	-
12	Pensil 2 B	13	bn	2,000.00	26,000.00
13	Pulpen Gramata H-3	24	bn	1,500.00	36,000.00
14	Typ Ex Kenko	10	bn	4,000.00	40,000.00
15	Stabilo	9	bn	2,000.00	18,000.00
16	Paku Payung	20	KKj	500.00	10,000.00
17	Stabilo	58	bn	4,500.00	261,000.00
18	Andi Plast	7	bn	1,000.00	7,000.00
19	Pulpen Warna Warni	9	bn	700.00	6,300.00
20	Amplop Dinas	100	bn	750.00	75,000.00
21	Amplop AA Panjang	5	KKj	18,000.00	90,000.00
22	Amplop AA Pendek	100	BH	200.00	20,000.00
23	Gunting Kecil	6	bn	3,000.00	18,000.00
24	Lem Setan	8	bn	8,000.00	64,000.00
25	Pensil Elasa	36	bn	750.00	27,000.00
26	Kaset CD	20	bn	4,000.00	80,000.00
27	Bon Faktur Biasa	17	bn	1,500.00	25,500.00
28	Bon Faktur NCR	16	Bh	2,250.00	36,000.00
29	Faktur Besar	12	bn	5,500.00	66,000.00
30	Blok Note	16	bn	2,500.00	40,000.00
31	Amplop Besar	121	bn	750.00	90,750.00
32	Lakban Besar	1	bn	8,500.00	8,500.00
33	Stasitan kecil bening	0	bn	750.00	-
34	Daftar Riwayat Hidup	50	bn	750.00	37,500.00
35	Karbon	3	KKj	25,000.00	75,000.00
36	Buku Expedisi	3	bn	12,500.00	37,500.00
37	Not Buk Batik	4	bn	6,500.00	26,000.00
38	Maap Tulang	15	bn	750.00	11,250.00
39	Maap Biola	34	bn	1,800.00	61,200.00
40	Penahan Arsip	7	bn	7,500.00	52,500.00
41	Lakban Bening	6	bn	8,500.00	51,000.00
42	Kertas Fax	5	bn	21,000.00	105,000.00
43	Kertas Jeruk Sampul	280	lbr	210.00	58,800.00
44	Plastik Sampul	50	lbr	450.00	22,500.00
45	HVS Warna	4	rim	80,000.00	240,000.00
46	Data Print	4	bn	25,000.00	100,000.00
47	Max Data	7	bn	3,000.00	21,000.00
48	Kertas Kado	10	lbr	500.00	5,000.00
49	Hvs	3	rim	52,000.00	156,000.00
50	Buku Kelengkapan Organisasi Kop	30	Bh	20,000.00	600,000.00
	Jumlah				3,312,300.00

Lampiran 3





